

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
(Studi Kasus Pada Kabupaten Labuhanbatu Utara)**

Oleh

Raviah Azhari Siagian
NIM 0502163208

Program Studi
AKUNTANSI SYARIAH



**AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
(Studi Kasus Pada Kabupaten Labuhanbatu Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (SI)
Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh:

Raviah Azhari Siagian
NIM 0502163208

Program Studi
AKUNTANSI SYARIAH



**AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RAVIAH AZHARI SIAGIAN**
NIM : 0502163208
Tempat/Tanggal Lahir : Aek Kanopan, 30 November 1998
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Aek Kanoapan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA (STUDY KASUS SETDA KAB, INSPEKTORAT, BPKAD KABUPATEN LABUHANBATU UTARA)**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, September 2020

Yang membuat pernyataan

Materai

6000

Raviah Azhari Siagian

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
(Studi Kasus Pada Kabupaten Labuhanbatu Utara)**

Oleh:

Raviah Azhari Siagian
Nim. 0502163208

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, Agustus 2020

Pembimbing I



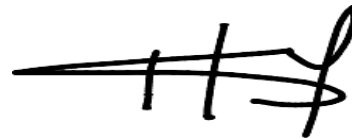
Dr. Nurlaila, MA
NIDN : 2021057503

Pembimbing II



Rahmat Daim Harahap, SE, I M. Ak
NIDN : 0126099001

Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



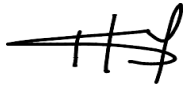
Hendra Harmain, SE, M. Pd
NIDN : 2010057302

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA (Studi Kasus Pada Kabupaten Labuhanbatu Utara)” an. Raviah Azhari Siagian, NIM 0502163208 Prodi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 02 September 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Prodi Akuntansi Syariah.

Medan, 14 September 2020
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Prodi Akuntansi Syariah
UIN-SU
Sekretaris,

Ketua,



Hendra Harmain, M.Pd
NIDN. 2010057302



Kusniawaty, SE.Ak, M.Ak
NIDN. 2014068001

Anggota



1. **Dr. Nurlaila, MA**
NIDN. 021057503



2. **Rahmat Daim Harahap, SE, I M, Ak**
NIDN. 0126099001



3. **Dr. H. Muhammad Yafiz, M.Ag**
NIDN. 2023047602



4. **Kusniawaty, SE.Ak, M.Ak**
NIDN. 2014068001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara Medan



Dr. Andri Soemitra, MA
NIDN. 200705760

ABSTRAK

Raviah Azhari Siagian, Nim 0502163208. “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Labuhanbatu Utara”. Dibawah bimbingan Ibu Dr. Nurlaila Harahap, MA selaku Pembimbing Skripsi I , dan Bapak Rahmat Daim Harahap,M.Ak selaku Pembimbing Skripsi II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan kabupaten labuhanbatu utara. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal keuangan kabupaten labuhanbatu utara. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan kabupaten labuhanbatu utara. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode sampel *Convenience Sampling*. Kuesioner yang dapat diproses lebih lanjut sebanyak 49 kuesioner. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi liner berganda dengan menggunakan software SPSS versi 22.0. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas, yakni variabel sistem pengendalian internal, standar akuntansi pemerintah mampu mempengaruhi kualitas laporan keuangan sebesar 55,8% sisanya sebesar 100% - 55,8% = 44,2% dijelaskan oleh variabel atau faktor lainnya. Berdasarkan hasil uji simultan dengan uji F, sistem pengendalian internal, standar akuntansi pemerintah secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata kunci: Sistem Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Laporan Keuangan.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan berupa Iman, Islam dan juga kesehatan serta kekuatan kepada penulis, walaupun dengan langkah tertatih-tatih namun dengan penuh keyakinan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sembari dengan senantiasa berdo'a semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberkahi-Nya. Selanjutnya shalawat dan salam disampaikan kepada Rasul Al-Amin Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam yang telah membawa risalah Islam berupa ajaran yang hak lagi sempurna bagi manusia dan seluruh penghuni alam ini.

Untuk melengkapi tugas-tugas perkuliahan dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana dalam Ilmu Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, maka penulis menyusun skripsi ini dengan judul **“PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA (STUDY KASUS SETDA KAB, INSPEKTORAT, BPKAD KABUPATEN LABUHANBATU UTARA)”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat adanya bimbingan dan motivasi serta bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Melalui kata pengantar ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih terkhusus kepada orangtua dan nenek saya tercinta yang sudah membesarkan saya dari kecil hingga sekarang yaitu Ayahanda Amir Husin Siagian dan Ibunda Alm Azaniar Tanjung dan nenek saya Dahlita Siregar yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan dan doa yang selalu dipanjatkan serta menjadi motivasi dan inspirasi serta semangat terbesar penulis untuk terus melangkah dan melupakan lelah demi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.

Untuk itu melalui kata pengantar ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Hendra Harmain, SE, M.Pd selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu Kusmilawaty, SE, Ak, M.Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Ibu Arnida Wahyuni, M.SI selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan, arahan dan saran-saran yang baik mulai awal perkuliahan sampai penyelesaian proposal dan juga skripsi ini. Terima kasih atas kesabarannya dalam membimbing penulis selama ini, semoga amal kebaikan Ibu dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
6. Ibu Dr. Nurlaila Harahap, MA selaku Pembimbing Skripsi I yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan masukan, bimbingan arahan dan saran-saran yang baik Terima kasih atas ilmu yang ibu berikan, waktu dan kesabarannya dalam memberi arahan selama diskusi online akibat pandemic Covid 19, semoga amal kebaikan ibu dibalas oleh Allah Subhana wa ta'ala.
7. Bapak Rahmat Daim Harahap, M.Ak selaku Pembimbing Skripsi II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan masukan, bimbingan arahan dan saran-saran yang baik Terima kasih atas ilmu yang bapak berikan, waktu dan kesabarannya dalam memberi arahan selama diskusi online akibat pandemic Covid 19, semoga amal kebaikan ibu dibalas oleh Allah Subhana wa ta'ala.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang tidak dapat penulis sebutkan namanya, terima kasih atas warisan ilmu dan curahan pengetahuan yang

secara ikhlas telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada penulis selama di bangku perkuliahan.

9. Kasubag, pimpinan dan pegawai Setda, Bpkad, Inspektorat di Kabupaten Labuhanbatu Utara tempat saya melakukan riset, terimakasih telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan riset skripsi ini.
10. Seluruh Keluarga Besar Akuntansi Syariah angkatan 2016 terkhusus kelas E yang selama ini telah berjuang bersama-sama selama masa perkuliahan, yang telah memberikan semangat, motivasi dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman terkhusus saya Reni, Yuli, Nia, Siti Aminah, dan Vivi yang mana bersama-sama membantu, memberikan masukan, berbagi keluh kesah dan nasihat selama menyelesaikan skripsi ini, semoga kita bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. Semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah Subhana wa ta'ala. Aamiin.
12. Terkhusus teman saya Dian Lesmana yang mana bersama-sama membantu, memberikan masukan, berbagi keluh kesah dan nasihat dan semangat selama menyelesaikan skripsi ini, Semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah Subhana wa ta'ala. Aamiin
13. Teman-teman yang sudah berjuang bersama selama masa bimbingan Nia, Reni, Yuli, Mahdanur, Ulay, Vivi, Aziz, Cinta, Reisi, Minah, Bibah, Hafily, Febri, Mala, Nadia dan yang lainnya. Terima kasih sudah saling berbagi ilmu, memberitahu apa apa yang perlu dan memberikan arahan juga masukan yang membangun, serta memberi semangat yang tak henti.
14. Teman-teman KKN Kelompok 57 Kota Medan, Kelurahan Belawan Bahari, Kec. Medan Belawan, terima kasih atas kesan dan pesan selama 1 bulan kebersamaan menyelesaikan satu dari 3 tri darma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat.

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis yang mendukung serta yang banyak membantu penulis mengumpulkan data dan informasi untuk menyusun skripsi ini.

Akhirnya penulis panjatkan do'a agar seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, semoga atas bantuan dan amal baiknya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun penulis berikutnya, dan juga pembaca dimasa yang akan datang. Sekali lagi penulis ucapkan ribuan terima kasih.

Medan, Agustus 2020

Penulis

Raviah Azhari Siagian
Nim. 0502163208

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN

PERSETUJUAN.....	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Perumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Teoritis.....	10
a. Pengertian Kualitas Laporan Keuangan	10
b. Pengertian Laporan Keuangan	10
c. Tujuan Laporan Keuangan.	12
d. Asumsi Dasar.	12
e. Jenis Laporan Keuangan.	14
f. Pengguna Laporan Keuangan.....	14
g. Prinsip Akuntansi.	14
h. Karakteristik Akuntansi.....	17
1. Sistem Pengendalian Internal.	18

a.	Pengertian Pengendalian Internal.	18
b.	Tujuan Pengendalian Internal.	19
c.	Karakteristik Pengendalian Internal.....	20
d.	Prinsip Sistem Pengendalian Internal.	22
e.	Prosedur Sistem Pengendalian Internal	23
f.	Tim Satuan Pengawasan SPI	24
g.	Kegiatan Pengendalian.....	24
h.	Informasi dan Komunikasi.....	24
i.	Pemantaun Pengendalian Internal.	25
j.	Pihak yang Bertanggung Jawabatas SPI.	25
2.	Standar Akuntansi Pemerintah	26
a.	Pengertian Standar Akuntansi pemerintah.....	26
b.	Penyusunan dan Penerapan Standar.....	28
c.	Proses Penetapan Standar Akuntansi.	28
d.	Proses Penetapan SAP	39
3.	Kajian di dalam Syariah.	32
B.	Penelitian Terdahulu	33
C.	Kerangka Konseptual Penelitian.	49
D.	Hipotesa Penelitian.....	40

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Pendekatan Penelitian	41
B.	Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	41
C.	Populasi dan Sampel	41
D.	Data Penelitian	42
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	44
F.	Defenisi Operasional.....	44
G.	Teknik Analisis Data.....	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian	65
1. Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah	65
2. Seketaris Daerah	66
3. Inspektorat.....	66
B. Teknik Pengumpulan Data	67
1. Karakteristik Responden.....	67
C. Hasil Uji Kualitas Data.....	73
1. Hasil Uji Validitas	73
2. Hasil Uji Reliabilitas.....	74
3. Uji Asumsi Klasik	75
a) Hasil Uji Normalitas	74
b) Uji Multikolinearitas.....	77
c) Uji Heterokedasitas.....	78
4. Analisis Statistik Deskriptif.....	79
5. Analisis Regresi Linier Berganda.....	84
D. Uji Hipotesis.....	85
1) Uji Parsial (Uji t)	85
2) Uji Signifikan Simultan (uji F).....	87
3) Analisis Koefisien Determinan	88
E. Pembahasan	89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA.....	93
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	SPM-TU	6
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	39
Tabel 3.1	Waktu Penelitian	49
Tabel 3.2	Daftra Jumlah SKPD	50
Tabel 3.3	Jumlah Sampel	50
Tabel 3.3	Defenisi Operasional dan Pengukuran Tabel	56
Tabel 4.1	Tabel Rincian Jumlah Sampel.....	67
Tabel 4.2	Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin	68
Tabel 4.3	Karakteristik Berdasarkan Usia	68
Tabel 4.4	Karakteristik Berdasarkan Golongan	70
Tabel 4.5	Karakteristik Berdasarkan Jabatan.....	70
Tabel 4.6	Karakteristik Berdasarkan Masa Kerja	71
Tabel 4.7	Uji Validitas	73
Tabel 4.8	Uji Reliabilitas	74
Tabel 4.9	Uji Normalitas.....	76
Tabel 4.10	Uji Multikolinearitas	78
Tabel 4.11	Uji Heteroskedastisitas	79
Tabel 4.12	Uji Distribusi Frekuensi berdasarkan SPI.....	80

Tabel 4.13 Uji Distribusi Frekuensi berdasarkan SAP	81
Tabel 4.14 Uji Distribusi Frekuensi berdasarkan KKK	83
Tabel 4.15 Analisis Regresi Linier berganda.....	85
Tabel 4.16 Uji Signifikan Pengaruh Parsial (uji t).....	87
Tabel 4.17 Uji Pengaruh Simultan Parsial (uji f).....	88
Tabel 4.18 Koefisien Determinan	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian.	47
Gambar 4.1 Uji Normalitas	77
Gambar 4.1 Uji Normalitas Histogram	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia salah satu bentuk konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan di undangkannya undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang menyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggran pendapatan dan belanja daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang di tetapkan. Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 17 tahun 2003 tersebut, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP). Standar akuntansi pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang di terapkan dalam menyusun dan meyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian Standar akuntansi pemerintah merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.¹

Dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi laporan keuangan yang bermanfaat dan berguna bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila sistem pengendalian internal yang memiliki tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan

¹ Ari Udiyanti, Nyoman, N.L, Atmadja, T.A dan Darmawan, Surya, A.N, “*Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Buleleng)*”, *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol 2 No 1, 2014.

ketaatan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah dan pelaporan harus memiliki empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010. ²

² Ibid 2

Salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sistem pengendalian internal pemerintah. Sistem pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk menyediakan jaminan yang layak mengenai pencapaian dari sasaran manajemen dalam kategori keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi dari operasional dan pemenuhan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang biasa diterapkan.³ Sistem pengendalian internal yang memiliki tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan aset negar, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (peraturan pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah). Adanya sistem pengendalian internal berfungsi mengecek ketelitian dan keadalan data akuntansi, dengan sistem pengendalian internal yang baik, resiko terjadinya kesalahan pencatatan dan perhitungan data akuntansi dapat di minimalisasi sehingga mengurangi kemungkinan pemerintah mengalami kekeliruan. Oleh sebab itu, sistem pengendalian intern sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keunagan pemerintah tersebut.

Selanjutnya faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah standar akuntansi pemeritahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tujuan diberlakuakannya hal tersebut agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.⁴ Menurut PSAK Nomor 01 (revisi 2009) laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang

³ Alfin Ariens et al, *Auditing and Assurance Service: An Intergrated Approach*, (Jakarta, Edisi 12, 2008, h. 121

⁴ Ibid 3

sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 Tahun 2010. Untuk mewujudkan transparansi pengelola keuangan harus memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tujuan diberlakukannya hal tersebut agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.⁵ Apabila standar akuntansi pemerintah sudah mengikuti peraturan pemerintah maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Kualitas laporan keuangan meliputi tata kelola laporan keuangan yang baik, transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan khususnya mengenai penggunaan anggaran pendapatan dan belanja. Kualitas laporan keuangan adalah tingkat baik buruknya sesuatu, derajat atau taraf (kepandaian, kecakapan, dan sebagainya) serta mutu. kualitas laporan keuangan meliputi tata kelola laporan keuangan yang baik, transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan khususnya mengenai penggunaan anggaran pendapatan dan belanja. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh badan pemeriksa keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan operasional (LO), laporan perubahan ekuitas (LPE), laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL), laporan arus kas (LAK), dan catatan atas laporan keuangan (calk). Pada kenyataannya seringkali terjadi penyimpangan dan tidak efisien yang dilakukan aparatur pemerintahan dan masih terdapat instansi yang memiliki masalah keuangan khususnya terkait pengelolaan aset. Hal ini sangat berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik dan juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah.

Kabupaten labuhanbatu utara adalah kabupaten yang baru dimekarkan dari kabupaten labuhanbatu sesuai dengan undang-undang nomor 23 Tahun 2008 pada 24 Juni 2008 tentang pembentukan kabupaten labuhanbatu utara, semasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kabupaten labuhanbatu utara adalah merupakan daerah pemekaran dari kabupaten labuhanbatu yang dimekarkan menjadi 3 (tiga) wilayah yaitu: Kabupaten labuhanbatu sebagai kabupaten induk dengan ibukota Rantauprapat, kabupaten labuhanbatu selatan dengan ibukota kota pinang, kabupaten labuhanbatu utara dengan ibukota Aek kanopan. Menurut catatan sejarah pada masa kolonial belanda wilayah kabupaten labuhanbatu adalah daerah Swapraja yang diperintahkan pada sultan dan terdiri aei 4 (Empat) kesultanan yaitu: Kesultanan Kota Pinang berkendudukan di Kota Pinang, Kesultanan kualuh berkendudukan di Tanjung Pasir, Kesultanan Panai berkendudukan di Labuhan Bilik.

Dengan demikian secara administratif pada awalnya kabupaten labuhanbatu adalah merupakan bagian wilayah afdeling asahan, pada masa itu afdeling di pimpin oleh presiden (Bupati) sedangkan onder afdeling di pimpin oleh Controleur (Wedana). Controleur labuhanbatu pertama kali berkendudukan di kampung labuhanbatu, tahun 1895 dipindah ke labuhan Bilik, tahun 1942 pindah ke Marbau, Tahun 1925 pindah ke Aek Kota Batu dan Tahun 1932 dipindah ke Rantauprapat hingga indonesia memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan tepatnya tanggal 2 Oktober 1945 Mr.Teuku Muhammad Hasan diangkat menjadi Gubernur Sumatera Utara, Kemudian tanggal 3 Oktober 1945 Gubernur mengumumkan proklamasi kemerdekaan republik indonesia yang dihadiri utusan/wakil-Wakil daerah.

Fenomena yang terjadi pada kabupaten labuhanbatu utara pada tahun 2017 sampai 2018 laporan keuangan kabupaten labuhanbatu utara mendapat hasil laporan resume hasil badan pemeriksaan keuangan (BPK) atas sistem pengendalian intern kabupaten labuhanbatu utara 2017 sampai 2018. Badan pemerikasaan keuangan (BPK) berdasarkan (UU) Nomor 15 tahun 2004 tentang badan pemeriksaaan keuangan serta undang-undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa neraca, laporan realisasi

anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL), laporan operasional (LO), laporan arus kas (LAK) dan laporan perubahan ekuitas (LPE) serta catatan atas laporan keuangan (calk) untuk tahun yang terakhir pada tahun tersebut.

Pertama BPK menemukan kondisi pengelolaan aset tetap kurang memadai, perbup tersebut antara lain mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pengapusan serta penatausahaan. Berdasarkan LHP atas sistem pengendalian internal bahwa masih ada kendaraan sebanyak 16 unit dan peralatan laptop sebanyak tiga unit senilai Rp 980.430.000,00 dikuasai pihak lain. Pada tahun 2018 berdasarkan undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan UU No 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksaan keuangan (BPK), serta UU terkait lainnya. PP Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) pasal 18 ayat (3). BPK telah memeriksa neraca, laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL), laporan operasional (LO), laporan arus kas (LAK) dan laporan perubahan ekuitas (LPE).

Badan pemerikasaan keuangan (BPK) yang pertama menemukan kondisi yang dapat dilaporkan dengan sistem pengendalian internal dan operasinya yaitu penatausahaan dan pengelolaan kas dibendahara pengeluaran tidak tertib. Terdapat bukti dari temuan BPK yaitu tiga OPD/sakter yang terlambat mengajukan surat perintah membayar ganti uang (SPM-GU)-nihil dan surat perintah membayar tambah uang (SPM-TU)-nihil. Bukti pemeriksaan BPK SPM-GU dan SPM-TU yang melewati batas ketentuan.

Tabel 1.1

SPM-GU dan SPM-TU yang Melewati Batas Ketentuan

No	OPD/Sakter	Jenis SPM	Nilai (Rp)	Keterlambatan (hari)
	BPKAD	GU Nihil	180.601.620	3

	Setda	GU Nihil	933.448.170	3
	Setwan	GU Nihil	418. 158.708	3

Sumber : Resume hasil Badan Pemeriksaan Keuangan Labuhanbatu Utara

Sehingga dari hasil ketiga instansi diatas kondisi tersebut BPK menerbitkan laporan hasil pemriksaan (LHP) 2018 yang membuat opini wajar dengan pengecualian (WDP) berturut-turut dengan nomor 52.A/LHP/XVIII.MDN/05/2019 dan LHP atas kepatuhan peraturan perundang-undang nomor 52.C/LHP/XVIII.MDN.05/2019. Dari masalah-masalah diatas maka Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Selanjutnya fenomena standar akuntansi pemerintah PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah menyatakan bahwa informasi yang relevan, dan lengkap. Keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan keadaan yang ada. Masalah yang ada dalam standar akuntansi pemerintah Penyajian laporan keuangan kabupaten labuhanbatu utara masih ada yang belum memenuhi komponen laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah PP No. 71 tahun 2010.

Kurangnya pencatatan laporan perubahan saldo anggaran lebih (laporan perubahan SAL), Laporan arus kas (LAK), laporan perubahan ekuitas (LPE) dan perhitungan penyusutan aset tak berwujud/amortisasi belum diterapkan. Bukti dari badan pemeriksaan keuangan (BPK) bahwa aset tetap tak berwujud per 31 Desember 2018 disajikan sebesar Rp 1.358.784.000,00 yang berada pada delapan OPD/Sakter berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan komfirmasi kepala sub bidang inventarisasi bidang aset BPKAD, diketahui bahwa penyusutan aset daerah tak berwujud/amortisasi belum dilakukan, kebijakan akuntansi dengan kapitalisasi pencatatan, dan penyusutan BMD belum mengatur mengenai amortisasi. Kondisi ini tidak sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah

tentang akuntansi aset tetap yang menyatakan bahwa tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Dari masalah-masalah yang ada diatas maka standar akuntansi pemerintah sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan kabupaten labuhanbatu utara.⁶

Menurut penelitian yang dilakukan Muhammad Ikhsan tahun 2018 yang menunjukan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah sedangkan Susilawati dan Riani dalam penelitiannya sebagaimana diketahui bahwa permasalahan mengenai kualitas laporan keuangan kini semakin hangat untuk diperbincangkan, adanya kasus-kasus tentang buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di indonesia menjadi isu hangat yang perlu dikaji lebih dalam. Hal ini merupakan bukti dari kurangnya standar akuntansi pemerintah sehingga mampu menimbulkan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dibuat. Berbicara tentang kualitas laporan keuangan sistem pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintah sama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Secara simultan sistem pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintah sama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Karena sistem pengendalian internal dapat mencegah adanya suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga dapat memperoleh efisien dalam menyusun laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintah merupakan landasan bagi pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan kabupaten labuhanbatu utara.

Berdasarkan uraian masalah yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut kedalam skripsi yang berjudul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Standar Akuntansi**

⁶ Laporan Resume hasil Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Sistem Pengendalian Intern Kabupaten Labuhanbatu Utara 2017 sampai 2018

Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Labuhanbatu Utara”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Laporan keuangan yang disajikan belum baik sehingga laporan keuangan tidak ada peningkatan dari hasil badan pemeriksaan keuangan
2. Masih ada kekurangan dalam penyajian data-data laporan keuangan yang belum sesuai dengan peraturan yang ditetapkan
3. Lemahnya sistem pengendalian internal di kabupaten labuhanbatu utara

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan indentifikasi masalah diatas, penulis tidak akan membahas terlalu jauh untuk menghindari meluasnya pembahasan permasalahan dan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, permasalahan dalam penelitian dibatasi pada Pengaruh sistem pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada pegawai/staff dibagian akuntansi/keuangan/tata usaha BPKAD, SETDA, inspektorat yang berada di kabupaten labuhanbatu utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan di kabupaten labuhanbatu utara?
2. Apakah standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan kabupaten labuhanbatu utara?

3. Apakah sistem pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan kabupaten labuhanbatu utara?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan kabupaten labuhanbatu utara
- b. Untuk mengetahui pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan kabupaten labuhanbatu utara
- c. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan kabupaten labuhanbatu utara

2. Manfaat Penelitian

Ada pun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis khususnya mengenai pengaruh sistem pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.

b. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah mengenai masalah sistem pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.

c. Bagi Instansi Pendidikan

Masyarakat akademik pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya sebagai bahan referensi bagi yang melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan masalah ini.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan sebuah organisasi. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan hasil proses akuntansi yang dimaksudkan sebagai saran mengkomunikasikan informasi keuangan terutama kepada pihak eksternal. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti misalnya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan laporan keuangan, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitas sebagai pemilik dan arus kas. Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa depan dan khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.⁷

⁷ Arfan Ikhsan, Lili Safrida, Putri Kemala Dewi, Ikhsan Abdullah, Kusmilawati, Hasbiana Dalimunthe, "Analisis Laporan Keuangan", Penerbit Mandanatera, (Medan: 2018), h.5.

Laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan didalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi.⁸ Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang digunakan sebagai pelaporan aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat menjadi suatu pertanggungjawaban dan dasar pengambilan keputusan bagi para pemakainya.

Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan kepada pihak publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Meskipun demikian, informasi keuangan bukan merupakan tujuan akhir sektor publik. Informasi akuntansi berfungsi memberikan dasar pertimbangan untuk pengambil keputusan. Informasi akuntansi merupakan alat melaksanakan akuntabilitas sektor publik secara efektif, bukan tujuan akhir sektor publik itu sendiri. Selama ini akuntansi identik dengan pelaksanaan akuntabilitas finansial saja. Tantangan yang dihadapi akuntansi sektor publik adalah merupakan akuntansi menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memonitor akuntabilitas manajemen, akuntabilitas politik, dan kebijakan. Dapatkah akuntansi dijadikan sebagai alat untuk merencanakan dan memetakan arah pembangunan dan pertumbuhan sektor publik.⁹

⁸ Aqwa Naser Daulay, Muhammad Lathif Ilhamy Nasution, Nur Ahmadi Bi Rahmadi, *"Manajemen Keuangan"*, Penerbit FEBI UIN-SU Press (FEBI: 2016), h.12

⁹ Mardiasamo. *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: C.V Andi Offset 2009), h. 5

b. Tujuan Laporan Keuangan

Hasil akhir dari proses pencatatan keuangan diantaranya adalah laporan keuangan. Laporan ini merupakan pencerminan dari prestasi manajemen perusahaan pada suatu periode tertentu. Selain sebagai suatu alat pertanggungjawaban, laporan keuangan diperlakukan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut IAI (2004:4) laporan keuangan bertujuan untuk:

- 1) Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
- 2) Laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.
- 3) Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

c. Asumsi Dasar

Sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang disusun oleh Dewan Akuntansi Indonesia (DAI), dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan harus didasarkan kepada dua asumsi yaitu:

- 1) Asumsi Akrua (*Accrual*)

Yang dimaksud dengan asumsi akrual adalah bahwa setiap transaksi dan peristiwa yang terjadi baik yang sudah di lalui maupun yang akan terjadi harus diakui pada saat pelaporan keuangan dibuat (bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar). Asumsi ini

menjelaskan bahwa laporan keuangan tidak hanya memberikan informasi yang terjadi pada saat waktu yang terlewati (masa lalu) penerimaan dan pembayaran kas, akan tetapi juga memberikan informasi dari kewajiban pembayaran kas dan sumber kas dari pembayaran tersebut yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Salah satu PSAK yang menggunakan prinsip ini adalah PSAK nomor 24 tentang imbalan kerja (PSAK-24), khususnya mengenai imbalan pasca kerja, imbalan jangka panjang dan imbalan pemutusan hubungan kerja.

2) Asumsi Keberlangsungan Usaha (*Ongoing Concern*)

Setiap laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh setiap perusahaan harus berdasarkan kepada asumsi keberlangsungan usaha, artinya bahwa ketika perusahaan menyusun laporan keuangan tersebut perusahaan akan diasumsikan akan terus menerus beroperasi dan berjalan dimasa yang akan datang. Jadi tidak diasumsikan bahwa perusahaan tersebut akan tutup, failid atau likuidasi operasionalnya. Atau bahkan diasumsikan semua karyawannya akan di PHK.

Seperti halnya asumsi akrual, PSAK-24 tentang imbalan kerja merupakan salah satu PSAK yang menerapkan prinsip *Ongoing Concern*. Sepertinya prinsip ini tidak berlaku jika perusahaan sudah memiliki komitmen untuk menutup perusahaan dan juga melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawannya. Setidaknya hal ini berlaku kepada PSAK-24¹⁰

¹⁰ Ibid, h. 8

d. Jenis Laporan Keuangan

Setelah transaksi yang terjadi didalam perusahaan dicatat dalam persamaan dasar akuntansi, kemudian ringkasan transaksi tersebut dilaporkan kepada pihak luar perusahaan yang memerlukannya. Laporan keuangan menurut pernyataan standar laporan keuangan No. 1 Tahun 2002 (PSAK No 1 Tahun 2002) terdiri dari:

- 1) Neraca
- 2) Laporan laba rugi
- 3) Laporan perubahan ekuitas
- 4) Laporan arus kas
- 5) Catatan atas laporan keuangan

e. Pengguna Laporan Keuangan

Menurut kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam standar akuntansi keuangan (SAK) paragraf ke 9 (revisi 2009), dinyatakan bahwa pengguna laporan keuangan meliputi:

- 1) Investor
- 2) Karyawan
- 3) Pemberi pinjaman
- 4) Pemasok dan kreditor usaha lainnya
- 5) Pelanggan
- 6) Pemerintah
- 7) Masyarakat ¹¹

¹¹ Ibid h.21-24

f. Prinsip Akuntansi

Prinsip akuntansi dalam pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan pemerintah daerah antara lain meliputi:

1) Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan dalam laporan operasional (pendapatan-LO) beban, asset, kewajiban, dan ekuitas. Laporan realisasi anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum daerah.

2) Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh asset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan dari pada penilaian yang lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3) Prinsip Nilai Realisasi

Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasikan melalui APBD selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode satu tahun anggaran dimaksud. Prinsip layak

temu biaya pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) tidak menjadi penekanan dalam Akuntansi Pemerintah Daerah.

4) Prinsip Subtansi Mengungguli Formalitas

Informasi dimaksud untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan subtansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila subtansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

5) Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode pelaporan keuangan adalah tahunan dan semesteran sesuai ketentuan yang berlaku.

6) Prinsip Konsisten

Perlakuan akuntansi yang sama akan diterapkan pada kejadian yang serupa dan periode ke periode oleh pemerintah daerah. Namun demikian perubahan metode akuntansi akan dilakukan apabila metode yang baru diterapkan dinilai dapat menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam laporan keuangan.

7) Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh penggunaan laporan yang baik pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan Keuangan.

8) Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pemerintah daerah akan menggunakan prinsip kehati-hatian dan pertimbangan yang logis pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga asset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban atau belanja tidak dinyatakan terlalu rendah.¹²

g. Karakteristik Laporan Keuangan

1) Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai.

2) Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan.

3) Dapat Dibandingkan

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas syariah agar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan.¹³

¹² Dwi Ratmono dan Sholihin, Mahfud, “*Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*” Penerbit UPP STIM YKPN, (Yogyakarta: 2015), h.1

¹³ Muhammad Sahman Sitompul, Nurlaila Harahap, Hendra Hermain, “*Akuntansi Masjid*”, Penerbit FEBI UIN-SU Press, (FEBI: 2015), h. 65-66

4) Andal

Agar informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya dan andal, maka penyajian informasi pada laporan keuangan harus dibuat berdasarkan peraturan atau pedoman yang berlaku. Selain itu, laporan keuangan juga disajikan secara menyeluruh. Seperti yang kita ketahui, informasi dalam laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan informasi secara jujur dan diverifikasi. Sehingga informasi yang relevan saja tidak cukup karena tidak dapat diandalkan. Jika demikian, informasi yang ada pada laporan keuangan dapat menyesatkan dan merugikan pengguna laporan keuangan.¹⁴

h. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan

1) Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

2) Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

3) Pemanfaatan Informasi Teknologi

¹⁴ Ketahui karakteristik-laporan-keuangan <http://www.jurnal.id/id/blog/2018-karakteristik-kualitatif-yang-harus-ada-pada-laporan-keuangan/>

Pemanfaatan informasi teknologi adalah pengolahan dan penyebaran data yang di dapat dari mengkombinasikan perangkat computer dengan telekomunikasi.

4) Standar Akuntansi Pemerintah

Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

5) Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah suatu proses yang di jalakan oleh eksekutif (kepala daerah, instansi atau dinas dan segenap personel) yang di desain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapain tiga golongan tujuan yaitu keadalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum, dan peraturan yang berlaku dan efektivitas dan efisiensi operasi.¹⁵

Definisi kualitas menurut KBBI adalah “Tingkat baik buruknya sesuatu, derajat atau taraf (kepandaian, kecakapan, dan sebagainya) serta mutu”.¹⁶

2. Sistem Pengendalian Internal

a. Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisien dan mendorong dipatuhinya kebijakan

¹⁵ Nur Laila Yuliani dan Rahmawati Dwi Agustini. Faktor-faktor yang mempengaruhi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Bisnis Ekonomi, No 1 Vol 14, April 2016

¹⁶ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kualitas> Kualitas–Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

manajemen. Definisi sistem pengendalian internal tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut.¹⁷

IAPI (2011;319.2) mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut:

- 1) Keadalan pelaporan keuangan
- 2) Efektivitas dan efisiensi operasi
- 3) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
- 4) Menjaga kekayaan dan catatan organisasi

Sistem pengendalian internal merupakan kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi, kegiatan Pengendalian Umum dan Pengendalian aplikasi, yang masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Pengendalian Umum

Pengendalian ini meliputi pengamanan sistem informasi, pengendalian atas akses, pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi, pengendalian atas perangkat lunak sistem, pemisahan tugas, dan komunitas pelayanan.

2) Pengendalian Aplikasi

Pengendalian ini meliputi pengendalian otorisasi, pengendalian kelengkapan, pengendalian akurasi, dan pengendalian terhadap keadalan pemrosesan dan file data. Dalam kaitannya dengan efektivitas penyusunan laporan keuangan maka baik buruknya implementasi sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

¹⁷ Mulyadi, "*Sistem Akuntansi*", Penerbit Salemba Empat, (Jakarta:2016), h. 129

b. Tujuan Pengendalian Internal

Ada tujuan sistem pengendalian intern yang efektif dapat digolongkan sebagai berikut :

- 1) Untuk menjamin kebenaran data akuntansi
- 2) Untuk mengamankan harta kekayaan dan catatan pembukuaannya
- 3) Untuk menggalakan efisien usaha
- 4) Untuk mendorong ditaatinya kebijakan pimpinan yang telah digariskan.¹⁸

Manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan laba rugi para investor, kreditor dan para pemakai lainnya. Manajemen memikul baik tanggung jawab hukum maupun professional untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tujuan pengendalian internal yang efektivitas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan tersebut.

Pengendalian dalam perusahaan akan mendorong pemakain sumber daya secara efektif dan efisien untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran perusahaan. Tujuan yang penting dalam pengendalian ini adalah memperoleh informasi keuangan dan non-keuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan. Manajemen harus menguji efektifita pelaksanaan pengendalian.

Tujuan penggunaan ini adalah untuk membentuk apakah pengendalian telah berjalan seperti yang telah dirancang dan apakah orang yang melaksanakan memiliki kewenangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian secara efektif.

¹⁸ Amin Widjaya Tunggal, *Struktur Pengendalian Intern* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), h.

Organisasi-organisasi public, non-publik, dan nirlaba diwajibkan menaati berbagai hukum dan peraturan. Beberapa hanya berhubungan secara tidak langsung dengan akuntansi, seperti Undang-Undang perlindungan hukum dan hak sipil, sementara yang lainnya berkaitan erat dengan akuntansi, seperti peraturan pajak penghasilan dan kecurangan.

c. Karakteristik Pengendalian Internal

Standar akuntansi seksi 319 pertimbangan atas pengendalian intern dalam audit laporan keuangan paragraph 07 menyebutkan lima komponen pengendalian internal yaitu:

1) Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Pimpinan instansi wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya. Lingkungan pengendalian terdiri dari:

- a) Penegakan integritas dan nilai etika
- b) Komitmen terhadap kompetensi
- c) Kepemimpinan yang kondusif
- d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
- g) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
- h) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2) Penilaian Risiko (*Risk Assesment*)

Dalam rangka penilaian resiko, pimpinan instansi dapat menepatkan tujuan instansi dan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan. Penilaian resiko terdiri dari:

- a. Penetapan tujuan instansi secara keseluruhan
- b. Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan
- c. Identifikasi risiko
- d. Analisis risiko
- e. Mengelola risiko selama perubahan

3) Prosedur Pengendalian (*Control Prosedure*)

Prosedur pengendalian ditetapkan untuk standardisasi proses kerja, sehingga menjamin tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah atau mendeateksi terjadinya ketidakberesan serta kesalahan.

4) Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Informasi dan komunikasi merupakan unsur-unsur yang paling penting dari pengendalian internal perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian, penilain resiko, prosedur pengendalian, dan pemantauan diperlukan oleh manajemen, untuk pedoman operasi, dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hokum serta peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan. Informasi juga diperlukan kepaa pihak luar perusahaan. Manajemen dapat menggunakan informasi jenis ini untuk menilai standar eksternal, hokum, peristiwa, dan kondisi yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan serta pelaporan eksternal.

5) Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan terhadap sistem pengendalian internal akan menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian. Pengendalian internal dapat dimonitor secara efektif melalui penilaian khusus atau sejalan dengan usaha manajemen. Usaha pemantauan yang terakhir dapat dilakukan dengan cara mengamati perilaku karyawan atau tanda-tanda peringatan yang diberikan oleh sistem akuntansi.¹⁹

¹⁹ Ibid h,4

d. Prinsip-prinsip Sistem Pengendalian Internal

Untuk dapat mencapai tujuan pengendalian akuntansi, suatu sistem harus memenuhi enam prinsip dasar pengendalian intern. Adapun prinsip dasar pengendalian intern meliputi:

1) Pemisahaan Fungsi

Tujuan utama pemisahaan fungsi yakni untuk menghindari dan mengawasi secepatnya atas kesalahan atau ketidakberesan. Adanya pemisahaan fungsi untuk dapat mencapai suatu efisien dalam pelaksanaan tugas.

2) Prosedur Pemberian Wewenang

Tujuan prinsip ini adalah untuk menjamin bahwa transaksi telah diotoritas oleh orang yang berwenang.

3) Prosedur Dokumentasi

Dokumen yang layak, penting guna menciptakan sistem akuntansi yang efektif. Dokumentasi memberi dasar penetapan tanggung jawab untuk pelaksanaan dan pencatatan akuntansi.

4) Prosedur dan Pencatatan Akuntansi

Tujuan dari pengendalian ini yakni agar dapat disiapkannya catatan akuntansi yang kemudian dapat diteliti secara cepat dan data akuntansi dapat dilaporkan kepada pihak yang menggunakannya tepat pada waktunya.

5) Pengawasan Fisik

Berhubungan dengan alat yang mekanis dan elektronis dalam pelaksanaan dan pencatatan transaksi.

6) Pemeriksaan Internal secara bebas

Menyangkut perbandingan antara catatan aset dengan aset yang betul-betul ada, menyelenggarakan rekening-rekening control atau tagihan pelanggan. Hal ini bertujuan untuk mengadakan pengawasan kebenaran data.

²⁰ Ibid h. 131

e. Prosedur Sistem Pengendalian Internal**1) Prosedur Pengawasan**

- a) Menyiapkan perencanaan program pemeriksaan rutin/pengawasan tahunan
- b) Meminta untuk pengesahaan direktur untuk program pemeriksaan rutin/pengawasan tahunan telah disusun
- c) Melakukan persiapan pemeriksaan rutin/pengawasan
- d) Melakukan proses pemeriksaan rutin
- e) Menyusun laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi
- f) Menyampaikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi

2) Prosedur Pemeriksaan

- a) Menerima laporan kasus
- b) Melakukan verifikasi adanya kebenaran kasus
- c) Jika ada kasus, lanjutkan proses pemeriksaan
- d) Jika tidak ada kasus, selesai
- e) Menyusun rencana proses pemeriksaan dan meminta kepada direktur surat tugas pemeriksaan

f. Tim Satuan Pengawasan Sistem Pengendalian Internal

- 1) Melakukan proses pemeriksaan rutin di unit instansi bagian yang berhubungan dengan kasus yang terjadi
 - 2) Menyusun laporan hasil pemeriksaan rekomendasi
 - 3) Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi kepada direktur
-

g. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan instansi wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dari sifat dan tugas dan fungsi yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian terdiri dari:

- 1) Review atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
- 2) Pembinaan sumber daya manusia;
- 3) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- 4) Pengendalian fisik atas aset;
- 5) Penetapan dan revaluasi atas indikator dan ukuran kinerja;
- 6) Pemisahan fungsi
- 7) Otoritas atas transaksi dan kejadian yang penting;
- 8) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- 9) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; Akuntabilitas terhadap sumber dan pencatatannya; dan
- 10) Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting.

h. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan instansi wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif.

i. Pemantauan Pengendalian Internal

Pimpinan instansi wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian internal melalui:

- 1) Pemantauan berkelanjutan
- 2) Evaluasi terpisah

3) Penyelesain audit ²¹

j. Pihak yang bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal

Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengendalian internal organisasi, diantaranya adalah:

1) Manajemen

Manajemen bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menyelenggarakan secara efektif pengendalian intern organisasinya.

Direktur utama perusahaan bertanggung jawab untuk menciptakan atmosfer pengendalian ditingkat puncak, agar kesadaran terhadap pentingnya pengendalian menjadi tumbuh diseluruh organisasi.

2) Dewan Komisaris dan Komite Audit

Dewan komisaris bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen bertanggung jawab dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern.

3) Auditor intern

Auditor intern bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengevaluasi memadai atau tidaknya pengendalian intern entitas dan membuat rekomendasi peningkatannya.

4) Personal lain Entitas

Peran dan tanggung jawab semua personil lain yang menyediakan informasi atau yang menggunakan informasi yang dihasilkan oleh pengendalian intern harus ditetapkan dan dikomunikasikan dengan baik.

5) Auditor Independen

Sebagai bagian dari prosedur auditnya terhadap laporan keuangan, auditor dapat menemukan kelemahan pengendalian intern kliennya, sehingga ia dapat mengkomunikasikan temuan auditnya tersebut kepada manajemen, komite audit,

²¹ Mulyadi, Auditing, Edisi 6, (Jakarta : Salemba Empat, 2002), h. 183

atau dewan komisaris. Berdasarkan temuan auditor tersebut, manajemen dapat melakukan peningkatan pengendalian intern entitas.²²

3. Standar Akuntansi Pemerintah

a. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah

Akuntansi adalah suatu sistem yang mengukur aktivitas-aktivitas bisnis, memproses informasi tersebut kedalam bentuk laporan-laporan, dan mengkomunikasikannya kepada para pengambil keputusan.²³

Akuntansi dapat pula didefinisikan proses mengendalikan, mengukur, dan mengomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan.²⁴

Akuntansi adalah suatu sistem yang mengukur aktivitas-aktivitas bisnis, memproses informasi tersebut kedalam bentuk laporan-laporan, dan mengkomunikasikannya kepada para pengambil keputusan.²⁵ Akuntansi dapat pula didefinisikan proses mengendalikan, mengukur, dan mengomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan.²⁶

Akuntansi pemerintah merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang pesat. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas public atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan. Sebagai salah satu bidang dalam ilmu akuntansi, definisi akuntansi pemerintahan tidak akan terlepas dari pemahaman tentang akuntansi itu sendiri, termasuk perkembangannya diindonesia.

²² Mulyadi, *Sistem Akuntansi Keuangan*, Edisi (Jakarta : Salemba Empat, 2002), h. 182

²³ Simon dan Schuster (Asia) Pte. Ltd. Printice-Hall. "Akuntansi di Indonesia", Penerbit Salemba Empat, (Jakarta:1997), h. 3

²⁴ Dedi Nordiawan, Dkk. *Akuntansi Pemerintahan* (Jakarta: Salemba Empat, 2007, h. 1)

²⁵ Ibid h.3-4

²⁶ Ibid, h.1

Sedangkan pengertian pemerintahan, meskipun nampak konotasi lembaga politik lebih menonjol, aspek ekonominya tidak dapat dikesampingkan.²⁷

Standar akuntansi pemerintah merupakan panduan bagi pemakainya dalam melaksanakan fungsi terkait. Standar merupakan acuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh organisasi yang berkompetensi serta berwenang dalam bidang terkait.

Peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah pasal 9 menyatakan bahwa dengan diberlakukannya peraturan ini maka peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian, peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan.

Defenisi standar akuntansi pemerintahan yang tercantum dalam peraturan pemerintah republik Indonesia No 71 tahun 2010 adalah standar akuntansi pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”²⁸

Standar akuntansi pemerintah merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan laporan keuangan pemerintahan di Indonesia.²⁹ Untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan akuntansi, dan audit di pemerintah pusat maupun pemda di republik Indonesia, diperlukan sebuah standar akuntansi pemerintah (SAP) yang kredibel yang dibentuk oleh komite SAP. Komite SAP merupakan sebuah cerita panjang seiring dengan perjalanan reformasi keuangan di Indonesia. Kebutuhan standar dan pembentukan komite penyusunan mulai muncul ketika desakan penerapan IPSAS semakin kuat.

²⁷ Ibid h.4

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*

²⁹ Purwaniati Nugraheni, dan Iman Subaweh. *Pengaruh Penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan*. Jurnal Ekonomi Bisnis No.1 Vol 13. April 2008.

b. Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia

Dalam sejarah perkembangan standar akuntansi pemerintahan Indonesia terdapat dua produk perundangan terkait standar akuntansi pemerintahan, yaitu peraturan pemerintah (PP) No 24 Tahun 2005 dan PP no. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi lama dalam PP. 24 Tahun 2005. PP. 24 Tahun 2005 menggunakan basis pencatatan kas menuju akrual (*cash toward accrual*) sedangkan PP. 71 Tahun 2010 menggunakan pencatatan Basis Akrual penuh (*full Accrual*)

c. Penyusunan dan Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Proses yang digunakan dalam standar akuntansi pemerintahan adalah proses yang berlaku umum secara internasional dengan penyesuaian terhadap kondisi yang ada diindonesia. Penyesuaian dilakukan antara lain dengan pertimbangan kebutuhan yang mendesak dan kemampuan pengguna untuk memahami dan melaksanakan standar yang ditetapkan.

Tahap-tahap penyiapan SAP adalah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi topik untuk dikembangkan menjadi standar
- 2) Pembentukan kelompok kerja (Pokja) didalam KSAP
- 3) Riset terbatas oleh kelompok kerja
- 4) Penulisan draf SAP oleh kelompok kerja
- 5) Pembahasan draf oleh komite kerja
- 6) Pengambilan keputusan draf untuk dipublikasikan
- 7) Peluncuran draf publikasian SAP (*Exposure Draft*)
- 8) Dengar pendapat terbatas (*Limited Hearing*) dan dengar pendapat public (*public Hearings*)
- 9) Pembahasan tanggapan dan masukan terhadap draf publikasian
- 10) Finalisasi Standar

d. Proses Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Proses penetapan setelah dilakukan *public hearing*, Standar dibahas bersama dengan tim penalaah standar akuntansi pemerintahan BPK. Setelah dilakukan pembahasan berdasarkan masukan-masukan KSAP melakukan finalisasi standar kemudian KSAP meminta pertimbangan kepada BPK melalui menteri keuangan. Namun draf SAP ini belum diterima oleh BPK karena komite belum ditetapkan dengan Keppres.³⁰

Dari proses tersebut dihasilkan *Exposure Draft* standar akuntansi sektor publik yang dikeluarkan oleh dewan standar akuntansi sektor publik-IAI. Ada enam *Exposure draft* yang dikeluarkan:

- 1) Penyajian laporan keuangan
- 2) Laporan arus kas
- 3) Koreksi surplus deficit, kesalahan fundamental, dan perubahan kebijakan akuntansi
- 4) Dampak perubahan nilai tukar mata uang luar negeri
- 5) Kos pinjaman
- 6) Laporan keuangan konsolidasi dan entitas kendalian.³¹

Dalam PP No. 71 tahun 2010 mengenai standar akuntansi emerintah menjelaskan komponen laporan keuangan terdiri dari:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam

³⁰ Arfan Ikhsan, Muhammad Yamin Noch, Azizul Kholis Hamdani, Junita Putri Rajana, *AKuntansi Sektor Publik*. (Medan: Madenatera, 2018), h. 248

³¹ Ibid, h. 121

satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan perubahan SAL)

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3) Neraca

Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas.

4) Laporan Operasional (LO)

Menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

5) Laporan Arus Kas (LAK)

Menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama satu periode.

6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Calk meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, laporan perubahan SAL, LO, LPE, neraca, dan

LAK. Calk juga mencukup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam standar akuntansi pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Publikasi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah untuk segera bergerak mengeluarkan SAP. Sampai kemudian, sebelum UU tentang Keuangan Negara ditetapkan, menteri keuangan RI telah menetapkan keputusan menteri keuangan nomor 308/KMK.012/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang komite standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah (KSAP), sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan keputusan menteri keuangan nomor 379/KMK.012/2004 tanggal 06 Agustus 2004. Komite ini bekerja dengan melibatkan banyak unsur yang secara formal dinyatakan terdiri atas unsur departemen keuangan, depertemen dalam negeri, dan unsur IAI.³²

4. Kajian didalam Syariah

a. Sitem Pengendalian Intern dalam presfektif islam

Dalam perkembangan bisnis saat ini, tindakan pengendalian yang dinilai cukup efektif adalah dengan menempatkan sistem pengendalian kedalam tindakan *preventive objective*, dimana penyimpangan atau kekurangan dapat dicegah sedini mungkin. Tindakan ini sangat bergantung pada komitmen manajemen dalam melakukan pengelolaan dengan prinsip *prudent*, karena hal ini mungkin saja dapat berdampak pada ketidakefektifan manajemen. Oleh karena itu, perlu adanya perkembangan strategis bagi manajemen organisasi untuk menerapkan fungsi pengendalian namun tetap menjaga dinamika besar pada seluruh fungsi organisasi secara keseluruhan.

³² Ibid h.7

Dalam perspektif islam, mungkin saja prinsip-prinsip pengendalian tidak sama dengan pendekatan konvensional. Dimana pada prinsip islam mengacu pada pola syariah dalam setiap kegiatan muamalah, termasuk sistem pengendalian intern pemerintahan. Sistem pengendalian intern dan eksternal, pengendalian pribadi dan social legalitas hukum tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah. Proses pengendalian dalam islam dapat menganalogikan proses pengendalian pada manajemen dengan filosofi islam. Sebagaimana dikatakan dalam firman Allah QS. Al-Hujurat ayat (6):

1) Surah Al-Hujurat ayat (6)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada mu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.³³

b. Standar Akuntansi Pemerintah di dalam perspektif islam

Standar akuntansi pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. pencatatan mengenai pengelolaan transaksi keuangan dari dulu sejak zaman Rasulullah sudah dikenal oleh umat islam, islam juga mengatur segala aspek

³³ Al quran dan Terjamaahnya

kehidupan dengan sangat adil dan jujur tidak terkecuali yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian. Islam memiliki pandangan bahwa seorang muslim yang kaya harus lebih baik dari pada seorang muslim yang miskin.

Meskipun dengan demikian tingkat ketakwaan yang tinggi harus melekat di dalam diri umat islam. Yang mana di dalam Al-Quran menjelaskan tentang adanya perintah melakukan sistem pencatatan yang jujur tekanan utamanya adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian dan keterbukaan dan keadilan antara kedua pihak yang memiliki hubungan muamalah.

Hal ini disebutkan dalam QS. Al-Mutaffifin ayat (1) dan QS. Al-Hujurat ayat (6) yang berbunyi:

2) Surah Al-Mutaffifin ayat (1)

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝١

Artinya:

Kehancuran dan kerugian bagi orang-orang yang curang. (Q.S Al-Mutaffifin ayat

1

c. Kualitas laporan keuangan di dalam presfektif islam

Laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan didalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung, bahkan kegiatan ekonomi merupakan kegiatan terpenting dalam kehidupan manusia.

Transaksi ekonomi memiliki nilai materialitas yang tinggi yang memiliki perselisihan dikemudian hari relatif besar, maka sesuai dengan ayat Al-Quran (QS, 2:282) yang artinya: “hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya”. Maksud dari ayat tersebut apabila suatu instansi melakukan transaksi-transaksi maka

hendaklah suatu instansi tersebut mempunyai catatan bukti transaksi yang sudah dijelaskan didalam al quran, agar tidak menimbulkan kecurangan atau salah paham dalam melakukan transaksi.

Pada ketiga ayat diatas Allah memeritahkan kaum mukmin untuk memeriksa teliti berita yang dibawa oleh orang fasik, dan hendaklah mereka berhati-hati dalam menerima berita tersebut, supaya orang tidak memberikan hukuman atau keputusan berdasarkan informasi yang diberikan oleh orang fasik. Hal ini karena disaat yang sama, orang fasik tersebut murah berdusta atau berbuat kesalahan. Dengan demikian, orang memutuskan berdasarkan informasinya akan terkena kedustaan dan kesalahannya. Padahal Allah SWT melarang kita untuk mengikuti jejak orang-orang yang berbuat kerusakan.

Para instansi khususnya pegawai keuangan harus memeriksa dengan teliti laporan keuangan, staf keuangan harus betul-betul meneliti dari bukti-bukti transaksi sehingga menjadi laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Dan instansi harus jujur dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang sesuai dengan standar syariah.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun hasil-hasil sebelumnya dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 2. 1

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

1.	Dinar Situmorang	Pengaruh Pemahaman SAP, Pendidikan dan Pelatihan serta Latar Belakang Pendidikan terhadap Penyusunan Keuangan SKPD Kabupaten Samosir	2012	Secara simultan pengaruh pemahaman SAP, Pendidikan dan Pelatihan, serta latar belakang pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan SKPD Kabupaten Samosir.	1. Variabel yang sama adalah Standar Akuntansi Pemerintah	1. Variabel yang digunakan pengaruh Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, 2. Lokasi penelitian di Kabupaten Labuhanbatu Utara 3. Tahun penelitian 2020
2.	Henry Gintar Ginting	Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pendidikan dan Pelatihan terhadap Penyusunan Laporan	2014	Pemahaman standar akuntansi pemerintahan, pendidikan dan penelitian berpengaruh secara simultan terhadap penyusunan	1. Variabel yang sama adalah Standar Akuntansi Pemerintah	1. Variabel yang digunakan pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, 2. Lokasi penelitian di Kabupaten Labuhanbatu Utara

		keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Medan		laporan keuangan pemerintah Kota Medan yang memiliki pengaruh positif signifikan dengan kata lain hipotesis alternative diterima.		3. Tahun penelitian 2020
3.	Melly Ros Siregar	Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Lingkungan Kerja, Komitmen, Serta Pendidikan dan Pelatihan terhadap Partisipasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan	2013	1. Secara parsial pemahaman SAP berpengaruh terhadap partisipasi dalam penyusunan laporan keuangan daerah. 2. Lingkungan kerja, komitmen, serta	1. Pengaruh standar Akuntansi Pemerintah	1. Tempat penelitian Kabupaten Labuhanbatu Utara 2. Tahun penelitian 2020 3. Responden staf dan pegawai yang ada di kantor BPKAD, Setda, Inspektorat.

		Daerah Pemerintah Kota Medan.		pendidikan dan pelatihan tidak berpengaruh terhadap partisipasi dalam penyusunan laporan keuangan daerah. 3. Secara simultan dengan dengan peroleh pemahaman SAP, Lingkungan kerja komitmen serta pendidikan dan penelitian berpengaruh terhadap partisipasi		
--	--	-------------------------------------	--	---	--	--

				dalam penyusunan lapoiran keuangan daerah Pemerintah Kota Medan.		
4.	M. Ali Fikri Biana Adha Inapty , RR. Sri Panca wati Marti ningsi h	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualiatas Informasi Laporan Keuangan	2016	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah, kompetensi aparatur, peran internal audit memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variable moderating.	1. Variabel independen yaitu Standar Akuntansi Pemerintah 2. Variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan	1. Tempat penelitian Kabupaten Labuhanbatu Utara 2. Tahun penelitian 2020 3. Responden staf dan pegawai yang ada di kantor BPKAD, Setda, Inspektorat.

5.	Dian Irma Diani	Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman)	2014	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan peran internal audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas	1. Variabel yang sama yaitu variabel dependenya yaitu kualitas laporan keuangan	1. Tempat penelitian Kabupaten Labuhanbatu Utara 2. Tahun penelitian 2020 3. Responden staf dan pegawai yang ada di kantor BPKAD, Setda, Inspektorat.
----	-----------------------	---	------	---	---	---

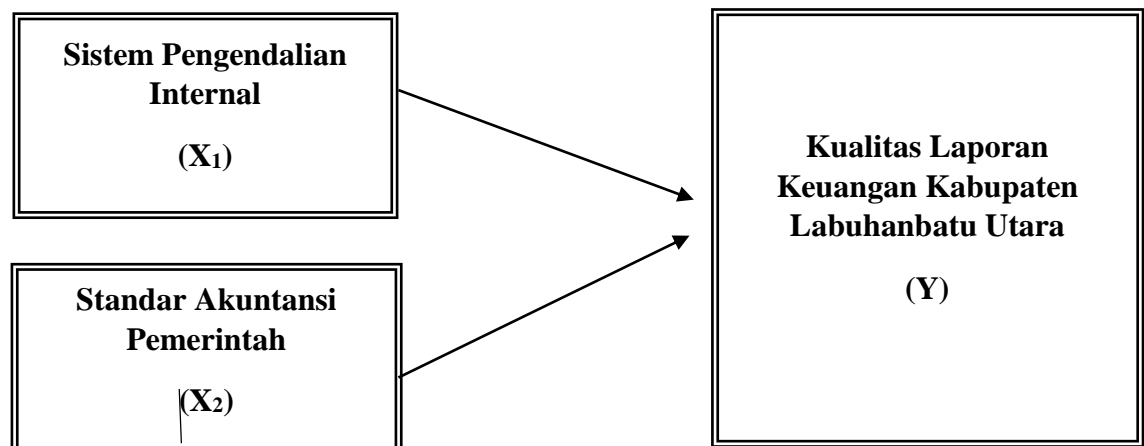
				laporan keuangan pemerintah daerah.		
6.	Desi Sefri Yensi, Amir Hasan Yuneri, Anita Anisma	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Internal (Internal Audit) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Study Empiris pada SKPD Kabupaten Kuatan Singingi)	2014	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kompetensi manusia sumber daya dan penerapan keuangan daerah sistem akuntansi positif berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sementara wilayah variable pengendalian internal (internal audit) tidak mempengaruhi kualitas lokal laporan	1. Variabel yang sama adalah variabel independen yaitu Sistem Pengendalian Internal 2. Variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan	1. Tempat penelitian Kabupaten Labuhanbatu Utara 2. Tahun penelitian 2020 3. Responden staf dan pegawai yang ada di kantor BPKAD, Setda, Inspektorat.

				keuangan pemerintah.		
7.	Susilawati, Dwi Septiani Riana	Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Pengendalian Internal sebagai Antesenden Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	2014	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan peran internal audit	1. Persamaan variabel independennya adalah standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal Dan variabel dependen kualitas laporan keuangan	1. Tahun penelitian 2020 2. Tempat penelitian di Kabupaten Labuhanbatu Utara 3. Respondennya pegawai dan staf yang ada di kantor BPKAD, Setda, Inspektorat. yang ada di kabupaten Labuhanbatu Utara

				berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.		
--	--	--	--	--	--	--

C. Kerangka konseptual

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka pemikiran adalah suatu bentuk kerangka yang dapat digunakan sebagai pendekatan yang memperlihatkan hubungan variabel didalam proses analisisnya untuk memecahkan masalah. Sesuai dengan gambar kerangka pemikiran (Gambar 2.1) kerangka pemikiran maka dapat dijelaskan yaitu:

1. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah hal yang paling berpengaruh dalam peningkatan keadilan pelaporan. Tujuan pengendalian internal yang efektif terhadap laporan keuangan adalah untuk memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan ini. Dalam penelitian susilawati dan Riani (2014) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 74.6%.

2. Standar Akuntansi

Dalam penelitian Adhi dan Suharjo 2013 standar akuntansi pemerintah menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Riana 2014 menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah (SAP) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Namun tidak demikian yang ditunjukkan pada hasil penelitian Sari et. Al 2014 yang menyatakan pemahaman SAP secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dipemerintah Kabupaten Jembrana.

D. Hipotesa Penelitian

Hipotesa dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara dan pertanyaan penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris.

Berdasarkan tujuan teoritis serta kerangka pemikiran yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan dalam penelitian sebagai berikut:

H₁ : Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan kabupaten labuhanbatu utara

H₂ : Standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan kabupaten labuhanbatu utara

H₃ : Sistem pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintah sama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan kabupaten labuhanbatu utara

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan atau pengaruh antara dua atau lebih variabel.³⁴ Tujuan dari pendekatan asosiatif adalah karena di dalam penelitian ini adalah bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kuantitatif.

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.³⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kualitas yang digunakan untuk menjelaskan variable independen, yaitu pengaruh sistem pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintah terhadap variable dependen, yaitu kualitas laporan Keuangan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah kantor badan pengelola keuangan dan aset daerah, sekretaris daerah, inspektorat yang berada di kabupaten labuhanbatu utara.

³⁴ Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2017) h.16

³⁵ Arfan Ikhsan dan Imam Ghozali, *Metodologi Penelitian Untuk Akuntansi dan Manajeme*, Pt. Madju Medan Cipta), h.10

Tabel 3.1

Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																			
		Juli 2019				Des 2019				Jan 2020				Apr-Jun 2020				Jul-Agst 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Prasurvei: Persiapan judul skripsi																				
	Persiapan teori pendukung judul skripsi																				
	Pengajuan judul skripsi																				
2	Proses usulan (UP) Penelitian penuliisan proposal																				
	Bimbingan proposal																				
	Seminar proposal																				
	Revisi proposal																				
3	Pengumpulan Data																				

4	Pengolahan dan analisis data																		
5	Bimbingan dan sidang																		

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas sekelompok orang kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi juga merupakan keseluruhan kumpulan elemen-elemen berkaitan dengan apa yang peneliti harapkan dalam mengambil beberapa kesimpulan.³⁶

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 72 pegawai/staf dibagian akuntansi/keuangan/tata usaha badan pengelola keuangan dan aset daerah, sekretaris daerah, Inspektorat yang berada di kabupaten labuhanbatu utara. Jumlah keseluruhan pegawai/staf dibagian akuntansi/keuangan/tata usaha yang berada di ketiga SKPD seperti

Tabel 3.2

Daftar Jumlah SKPD Kabupaten Labuhanbatu Utara

No	Keterangan	Jumlah
1	Badan pengelola keuangan dan aset daerah	23
2	Sekretaris daerah	40
3	Inspektorat	9
	Jumlah	72

³⁶ Arfan Ikhsan, Muhyarsyah, Hasrudi Tanjung, Ayu Oktaviani, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. (Bandung, Citapustaka Media, 2014) h. 105

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan dipilih secara hati-hati dari populasi tersebut.³⁷ Ada pun metode pengambilan sampel yang di pakai peneliti pada penelitian adalah metode *Convenience Sampling*. *Convenience Sampling* merupakan desain sampel yang andal tetapi biasanya lebih murah dan lebih mudah dihasilkan.³⁸ Teknik pengambilan sampel ini dipilih karena pertimbangan lokasi yang bersedia mengisi kuesioner guna mendapatkan informasi sehingga dapat memudahkan dalam pengumpulan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Sampel pada penelitian ini adalah pegawai/staf dibagian akuntansi/keuangan/tata usaha badan pengelola keuangan dan aset daerah, sekretaris daerah, Inspektorat yang berada kabupaten labuhanbatu utara.

Berdasarkan kriteria sampel di atas dapat di simpulkan bahwa yang masuk kedalam kriteria sampel dalam penelitian ini hanya 49 pegawai/staf dibagian akuntansi/keuangan/tata usaha. Sehingga sampel dalam penelitian ini dijelaskan di tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Jumlah Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Badan pengelola keuangan dan aset daerah	23
2	Sekretaris daerah	23
3	Inspektorat	3
	Jumlah	49

³⁷ Ibid h. 106

³⁸ Ibid h. 115

D. Data Penelitian

1. Jenis Data

Jenis data yang saya gunakan didalam penelitian ini adalah menggunakan jenis data kuantitatif.

2. Sumber Data

Sumber data dapat dikatakan sebagai awal dari mana datangnya data yang saya peroleh dan merupakan faktor penting sebagai pertimbangan setiap pengumpulan data. Adapun sumber data yang saya peroleh dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder.

Data primer merupakan pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Pengumpulan data primer ini menggunakan pertanyaan lisan atau tertulis.³⁹ Data pertama diperoleh melalui penelitian lapangan, yang menjadi subyek penelitian adalah pegawai/staf dibagian akuntansi/keuangan/tata usaha badan pengelola keuangan dan aset daerah, sekretaris daerah, Inspektorat yang berada kabupaten labuhanbatu utara.

Penelitian ini memperoleh data langsung dengan memberikan daftar pertanyaan terstruktur (kuesioner) dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari pegawai/staf dibagian akuntansi/keuangan/tata usaha badan pengelola keuangan dan aset daerah, sekretaris daerah, Inspektorat yang berada kabupaten labuhanbatu utara sebagai responden dalam penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian ini adalah skor masing-masing indikator variabel yang diperoleh oleh pengisian kuesioner yang telah dibagikan kepada masing-masing pegawai/staf dibagian akuntansi/keuangan/tata usaha badan

³⁹Ibid, h. 123

pengelola keuangan dan aset daerah, sekretaris daerah, Inspektorat yang berada kabupaten labuhanbatu utara sebagai reponden.

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantaran. Data sekunder pada umumnya dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis, majalah artikel yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.⁴⁰

Jenis data sekunder yang saya ambil dalam penelitian ini yaitu data internal. Data internal merupakan dokumen-dokumen akuntansi dan operasi yang dikumpulkan, dicatat dan disimpan didalam suatu organisasi.⁴¹

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dengan metode data subyek yaitu jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau dari sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian.⁴²

Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu penelitian lapangan. Penelitian ini memperoleh data langsung dengan memberikan daftar pernyataan terstruktur (kuesioner) dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari pegawai/staff dibagian akuntansi/keuangan/tata usaha BPKAD, SETDA, INSPEKTORAT yang berada di Kabupaten Labuhanbatu Utara dibagian keuangan/akuntansi/tatausaha sebagai responden dalam penelitian ini. Pengukuran variabel-variabel dalam penelitian ini menggunakan skala Likert.

Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam angket dan merupakan skala paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Nama skala ini

⁴⁰ Ibid, h.128

⁴¹Ibid, h.130

⁴² Ibid, h. 121

diambil dari nama *Rensis Likert*, yang menerbitkan suatu laporan yang menjelaskan penggunaannya. Sewaktu menanggapi pertanyaan dalam skala likert, responden menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Biasanya disediakan lima pilihan skala dengan format seperti ini: Sangat setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju, sangat setuju.⁴³

F. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional adalah penejelasan mengenai cara-cara tertentu yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur *construct* menjadi variabel penelitian yang dapat diuji.⁴⁴ Variabel merupakan suatu sifat yang dapat memiliki berbagai macam nilai. Variabel biasanya diekspresikan dalam bentuk simbol/lambang (umumnya digunakan simbol x dan y) yang padanya dilekatkan bilangan atau nilai. Akan tetapi, suatu variabel biasanya hanya memiliki dua nilai. Apabila *construct* yang sedang kita kaji adalah gender, maka nilai yang kita lekatkan pada x adalah 1 dan 0, nilai 1 untuk salah satu jenis kelamin, nilai 0 adalah untuk jenis kelamin lainnya. Nilai variabel tergantung pada *construct* yang mewakilinya. Cara paling bermanfaat dalam menggolong-golongkan variabel adalah dengan membeda-bedakannya menjadi variabel independen dan variabel dependen.⁴⁵ Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Variabel Dependen

Variabel dependen (*dependent variables*) atau variabel terkait merupakan jenis variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. 1 Variabel ini secara sistimatis disimbolkan dengan huruf Y.⁴⁶ Dalam penelitian ini, variabel

⁴³ <https://id.m.wikipedia.org>

⁴⁴ Herman, *Pengaruh Ukuran Perusahaan*, h.30

⁴⁵ Ibid, h. 66

⁴⁶ Ibid, h. 67

dependennya adalah kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan merupakan untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu bahan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan di dalam pengambilan keputusan- keputusan ekonomi. Indikator dari variabel Y adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami.

2) Variabel Independen

Variabel independen (*independent variable*) disebut juga dengan variabel bebas merupakan jenis variabel yang dipandang sebagai penyebab munculnya variabel dependen yang diduga sebagai akibatnya. Variabel ini secara matematis disimbolkan dengan huruf X. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sistem pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintah Variabel X_1 sistem pengendalian internal adalah kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi, kegiatan pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.

Indikator dari variabel X_1 adalah pengendalian lingkungan, penaksiran resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan pengawsan, pemantauan. Setiap indikator yang diberikan pada variabel dijadikan dasar untuk pembuatan kuesioner dan diberikan jawaban dengan skor sebagai berikut:

- a. Sangat Setuju (SS) skor 5
- b. Setuju (S) skor 4
- c. Kurang Setuju (KS) skor 3
- d. Tidak Setuju (TS) skor 2
- e. Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1

Variabel X_2 standar akuntansi pemerintah adalah proses yang berlaku umum secara internasional dengan penyesuaian terhadap kondisi yang ada di Indonesia. Indikator dari variabel X_2 adalah neraca, penyajian laporan realisasi, laporan arus kas, penyajian CALK, penilaian persediaan, pengakuan

investasi, pengakuan aset tetap, perlakuan akuntansi kontruksi, perlakuan akuntansi kewajiban, perlakuan akuntansi koreksi kesalahan. Jumlah variabel ini tidak terbatas dalam sebuah model penelitian.⁴⁷.

Berikut ini akan diuraikan definisi dari masing-masing variabel yang digunakan berikut dengan operasional dan cara pengukurannya.

Tabel 3.2
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Jenis Variabel	Definisi	Indikator	Pertanyaan
Sistem pengendalian internal (X ₁)	Defenisi sistem pengendalian internal tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut	Komponen Pengendalian Internal 1. Pengendalian lingkungan 2. Penilaian resiko 3. prosedur pengendalian 4. Informasi dan pengawasan 5. Pemantauan	1 2 3,4 5,6 7
Standar Akuntansi Pemerintah (X ₂)	Standar Akuntansi Pemerintah merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upayah meningkatkan laporan	1. Laporan realisasi anggaran 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih 3. Neraca 4. Laporan operasional 5. Laporan arus kas	1 7 5 6 2

⁴⁷ Ibid, 68

	keuangan pemerintahan di Indonesia	6. Catatan atas laporan keuangan	3,4
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami	2 6,7 4,5 1

G. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan adalah regresi berganda. Karena membahas tentang dua variabel independen dan satu variabel dependen. Untuk mendukung hasil dan akurasi penelitian, data penelitian yang diperoleh akan dianalisis dengan statistik melalui bantuan program SPSS (*Statistical Package for the Social*) versi 22 alat diatas digunakan untuk mempermudah penelitian. Beberapa teknik analisis data dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Uji Validitas

Uji validitas ini perlu dilakukan dengan cara antara skor masing-masing butir pertanyaan di korelasikan dengan skor total yang di peroleh dari penjumlahan semua skor pertanyaan, alat ukur yang di gunakan mempunyai validitas bila korelasi tersebut signifikan, sehingga bisa di artikan bahwa alat ukur yang di gunakan dapat untuk mengukur yang hendak di ukur.⁴⁸

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan pengujian terhadap item pertanyaan. Reliabilitas menunjukan adanya konsistensi pada alat ukur dalam mengukur gejala

⁴⁸ Umar Sako, Felmi D. Lantowa, “ *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo*”, Jurnal Of Accounting Science, Vol. 2 No. 1, 2018

yang sama.⁴⁹ Dengan menggunakan instrumen reliabel dalam pengumpulan data, maka di harapkan dalam penelitian akan menjadi reliabel.⁵⁰

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah analisis yang digunakan untuk menilai apakah didalam model regresi liner *Ordinary Least Square* (OLS) terdapat masalah-masalah asumsi klasik.⁵¹ Sebelum melakukan pengujian regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yang berguna untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah memenuhi ketentuan dalam model regresi. Pengujian ini meliputi:

a) Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah didalam model regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Dalam penetian ini, uji normalitas menggunakan normal *Probability* plot (P-P Plot). Suatu variabel dikatakan normal jika distribusi dengan titik-titik data menyebar disekitar garis diagonal, dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal.⁵²

Selain dengan grafik, dalam penelitian ini normalitas data juga dapat dilihat dengan menggunakan uji statistic non-parametik *Kolmogorov-*

⁴⁹ Ibid h. 54

⁵⁰ Ibid h. 92

⁵¹ Laylan Syafina, *panduan penelitian* (Medan: Febi Prees, 2018), h. 22

⁵² Ibid h.187

Smirnov pada alpha sebesar 5%. Jika nilai signifikan dari pengujian *Kolmogorov Smirnov* lebih besar dari 0,05 berarti data normal.⁵³

b) Uji Multikolineritas

Pengujian multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi yang kuat diantara variabel-variabel bebas (independen) yang diikutsertakan dalam penentuan model. Untuk mendeteksi apakah model regresi linier mengalami multikolinearitas dapat diperiksa menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk masing-masing variabel Independen, yaitu jika variabel Independen mempunyai nilai VIF tidak melebihi 4 atau 5 berarti tidak terjadi multikolinearitas.⁵⁴

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika terbukti ada multikolineritas, sebaiknya salah satu dari variabel independen yang ada di dikeluarkan dari model, lalu pembuatan model regresi di ulang kembali.⁵⁵

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linier kesalahan pengganggu (e) mempunyai varians yang sama atau tidak dari satu pengamatan kepengamatan yang lain. Uji ini digunakan apakah dalam model regresi terjadi heteroskedastisitas varian dan residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.⁵⁶ Jika varians

⁵³ Ibid h. 188

⁵⁴ Ibid, h.187

⁵⁵ Ibid h. 90

⁵⁶ Ibid h.91

dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.⁵⁷

Deteksi atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika ada pola tertentu maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Tetapi jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.⁵⁸

Heteroskedastisitas dideteksi dengan uji *Gletsjer* yaitu dengan melakukan regresi antara nilai residual sebagai variabel dependen dengan variabel independen model regresi yang diajukan, dan untuk melakukan persamaan regresi bebas *hetero* maka hasil regresi tersebut harus tidak signifikan. Hasil uji *Gletsjer* menunjukkan bahwa variabel penelitian ini bebas heteroskedastisitas dibuktikan dengan tidak terdapatnya variabel bebas yang signifikan pada tingkat 5%.⁵⁹

d) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang beruntun sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak

⁵⁷ Ibid 188

⁵⁸ Arlia Sari Artana, *Skripsi Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Tahun 2016

⁵⁹ Ibid, h. 77

bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Sehingga kemungkinan besar model regresi menjadi tidak signifikan. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Untuk menguji autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin Waston (DW), yaitu: ⁶⁰

- 1) Jika D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif
- 2) Jika nilai D-W dibawah -2 sampai n +2 berarti tidak ada autokorelasi
- 3) Jika nilai D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi.

e) Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden. Ukuran yang digunakan dalam deskripsi lain berupa frekuensi, tendensi sentral (rata-rata median, modus), disperse (deviasi standard dan varian) dan koefisien korelasi antar variabel penelitian.⁶¹

f) Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda adalah analisis regresi yang menjelaskan hubungan antara perubahan respon (variabel dependen) dengan faktor-faktor yang mempengaruhi lebih dari satu preditor (variabel independen). Tujuan analisis linear berganda yaitu untuk mengukur intensitas hubungan antara dua variabel atau lebih dan membuat prediksi perkiraan nilai Y atas X.⁶²

⁶⁰ Ibid h. 186

⁶¹ Ibid, h.150

⁶² <http://wawasanedukasi.blogspot.com/2015/05/regresi-linier-ganda.html?m=1>

Persamaan regresi ganda dirumuskan:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana:

Y = Kualitas Laporan Keuangan

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X_1 = Sistem Pengendalian Internal

X_2 = Standar Akuntansi Pemerintah

e = Faktor gangguan

g) Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut.⁶³ Apakah benar mempunyai pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

a. Uji Statistik (uji t)

Uji statistik t adalah uji yang menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.⁶⁴ Hipotesis alternatif yang hendak diuji adalah sebagai berikut:

H_a : Masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen

⁶³ Ibid, h. 35

⁶⁴ Ibid, h. 199

Ada atau tidaknya pengaruh signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen derajat kepercayaan. Apabila tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 maka H_a diterima. Demikian pula sebaliknya jika tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 maka H_a ditolak.

H_o : Masing-masing variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

Bila H_a diterima dan H_o ditolak berarti ada hubungan signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

b. Uji Statistik F

Uji f atau lebih dikenal dengan uji simultan adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.⁶⁵ Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji F adalah:

- 1) Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka H_a diterima dan H_o ditolak. Ini menyatakan bahwa semua variabel independen tau bebas
- 2) Mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terkait
- 3) Jika nilai signifikan $> 0,0$ H_a ditolak dan H_o diterima. Ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terkait.

c. Kofisien Determinan (R^2)

⁶⁵ Ibid, h.37

Kofisien Determinan digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan varian variabel dependen.⁶⁶ Hasil uji kofisien determinasi (R^2) menjelaskan seberapa besar kemampuan model atau interaksi antara Sistem Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintah (Variabel Independen) dalam menjelaskan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Variabel Dependen).

⁶⁶ Ibid, h. 199

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Tugas pokok Tugas pokok merupakan aktifitas rutin dan dapat bertambah sesuai dengan kondisi pekerjaan. Kelancaran tugas pokok dapat dicapai dengan baik dan tepat waktu dengan dibarengi fungsi kerja (Job Function) dan deskripsi kerja (Job Description) yang jelas. Terlaksananya tugas pokok dan fungsi hanya dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dan efisien. Berdasarkan ketentuan BAB IX adalah peraturan bupati labuhanbatu utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah dan tugas pokok dan fungsi serta rincian tugas jabatan struktural dinas-dinas daerah kabupaten labuhanbatu utara.

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan aset daerah kabupaten labuhanbatu utara. Dalam upaya melaksanakan tugas pokok tersebut badan PKAD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. Tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah.

- a. Perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Pelaksanaan tugas teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi anggaran, perbendaharaan, pemberdayaan aset dan akuntansi
- c. Pelaksanaan pelayanan teknis administrative Badan; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Seketaris Daerah (SETDA)

Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota. Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota bertugas membantu Bupati/Wali kota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Sekretaris Daerah untuk kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati/Wali kota. Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 Asisten; di mana Asisten masing-masing terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 bagian.

3. Inspektorat

Inspektorat Kabupaten LabuhanBatu Utara Mempunyai Tugas Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Di Daerah, Dan Pembinaan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Serta Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Desa. Untuk Melaksanakan Tugas Pokok Tersebut, Inspektorat Mempunyai Fungsi :

- a) Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan
- b) Pelaksanaan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Dan Keuangan Melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan Kegiatan Pengawasan Lainnya;
- c) Pelaksanaan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu Atas Penugasan Bupati;
- d) Pelaksanaan Administrasi Inspektorat
- e) Membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Dan;
- f) Melaksakan tugas-tugas lain Yang Diperintahkan Bupati Sesuai Dengan Tugas Pokok Dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlangsung.

Tabel 4.1
Rincian Jumlah Sampel

INSTANSI		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SETDA	23	46.9	46.9	46.9
	INSPEKTORAT	3	6.1	6.1	53.1
	BPKAD	23	46.9	46.9	100.0
	Total	49	100.0	100.0	

Sumber : Data primer yang diolah

Tabel 4.1 sebanyak 23 orang atau sebesar 46,9% adalah responden dari instansi SETDA, sebanyak 3 orang atau sebesar 6,1% adalah responden dari instansi Inspektorat, sebanyak 23 orang atau sebesar 46,9% adalah responden dari instansi BPKAD.

4. Hasil Uji Deskriptif

a. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pegawai dan staf yang bekerja di ketiga instansi yaitu BKAD, SETDA, dan Inspektorat yang berada di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Berikut ini adalah deskripsi mengenai identitas responden penelitian yang terdiri dari jenis kelamin, jurusan, usia, masa kerja, jabatan.

Melalui penyebaran kuesioner kepada 49 responden yang menjadi sampel dalam penelitian. berikut disajikan karakteristik responden yaitu sebagai berikut:

a) Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	LAKI-LAKI	22	44.9	44.9	44.9
	PEREMPUAN	27	55.1	55.1	100.0
	Total	49	100.0	100.0	

Sumber : Data primer yang diolah

Tabel 4.2 menunjukkan banyaknya responden berdasarkan jenis kelamin dari hasil penelitian, mayoritas responden sebanyak 27 orang atau sebesar 55,1% adalah responden perempuan dan sisanya adalah responden laki-laki yakni sebanyak 22 orang atau sebesar 44,9%.

b) Karakteristik responden berdasarkan usia

Tabel 4.3

Usia

USIA

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	23	1	2.0	2.0	2.0
	25	1	2.0	2.0	4.1
	27	2	4.1	4.1	8.2
	28	1	2.0	2.0	10.2
	29	1	2.0	2.0	12.2
	30	6	12.2	12.2	24.5
	32	1	2.0	2.0	26.5
	33	3	6.1	6.1	32.7

34	1	2.0	2.0	34.7
35	5	10.2	10.2	44.9
36	8	16.3	16.3	61.2
37	1	2.0	2.0	63.3
38	3	6.1	6.1	69.4
39	3	6.1	6.1	75.5
40	3	6.1	6.1	81.6
44	1	2.0	2.0	83.7
45	2	4.1	4.1	87.8
47	1	2.0	2.0	89.8
48	1	2.0	2.0	91.8
50	2	4.1	4.1	95.9
52	1	2.0	2.0	98.0
56	1	2.0	2.0	100.0
Total	49	100.0	100.0	

Sumber : Data primer yang diolah

Tabel 4.3 menunjukkan banyaknya responden berdasarkan usia, sebanyak 8 orang atau sebesar 16,3% berusia 36 tahun.

c) Karakteristik responden berdasarkan golongan

Tabel 4.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Golongan

GOLONGAN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S1	5	10.2	10.2	10.2
	S2	33	67.3	67.3	77.6
	D3	6	12.2	12.2	89.8
	SMA	5	10.2	10.2	100.0
	Total	49	100.0	100.0	

Sumber : Data primer yang diolah

Tabel 4.4 menunjukkan banyaknya responden berdasarkan pendidikan/golongan responden, sebanyak 5 orang atau sebesar 10,2% golongan atau pendidikan S1, sebanyak 33 orang atau sebesar 67,3% golongan atau pendidikan S2, sebanyak 6 orang atau sebesar 12,2% golongan atau pendidikan D3, sebanyak 5 orang atau sebesar 10,2% golongan atau pendidikan SMA.

d) Karakteristik responden berdasarkan jabatan

Tabel 4.5

Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

JABATAN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	BENDAHARA	3	6.1	6.1	6.1
	KEPALA	2	4.1	4.1	10.2
	KABAG	1	2.0	2.0	12.2
	KASUBAG	14	28.6	28.6	40.8
	KABID	4	8.2	8.2	49.0
	SEKETARIS	1	2.0	2.0	51.0

STAF	24	49.0	49.0	100.0
Total	49	100.0	100.0	

Sumber : Data primer yang diolah

Tabel 4.5 menunjukkan banyaknya responden berdasarkan jabatan responden. Sabanyak 3 orang atau sebesar 6,1% sebagai bendahara, sebanyak 2 orang atau sebesar 4,1% sebagai kepala, sebanyak 1 orang atau sebesar 2,0% sebagai kabag, sebanyak 14 orang atau sebesar 28,6% sebagai kasubag, sebanyak 4 orang atau sebesar 8,2% sebagai kabid, sebanyak 1 atau sebesar 2,0% sebagai sekretaris, sebanyak 24 atau sebesar 49,0% sebagai staf.

e) Karakteristik responden berdasarkan pengalaman masa kerja

Tabel 4.6

Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Masa Kerja

MASA_KERJA

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	1	2.0	2.0	2.0
2	1	2.0	2.0	4.1
4	2	4.1	4.1	8.2
5	4	8.2	8.2	16.3
6	2	4.1	4.1	20.4
7	6	12.2	12.2	32.7
8	1	2.0	2.0	34.7
9	12	24.5	24.5	59.2
10	8	16.3	16.3	75.5
11	3	6.1	6.1	81.6

12	2	4.1	4.1	85.7
14	1	2.0	2.0	87.8
15	1	2.0	2.0	89.8
23	2	4.1	4.1	93.9
25	2	4.1	4.1	98.0
34	1	2.0	2.0	100.0
Total	49	100.0	100.0	

Sumber : Data primer yang diolah

Tabel 4.6 menunjukkan banyaknya responden berdasarkan masa kerja responden, sebanyak 12 orang atau sebesar 24,5% sudah bekerja selama 9 tahun, sebanyak 8 orang atau sebesar 16,3% sudah bekerja selama 10 tahun, sebanyak 6 orang atau sebesar 12,2% sudah bekerja selama 7 tahun, sebanyak 4 orang atau sebesar 8,2% sudah bekerja selama 5 tahun, sebanyak 3 orang atau sebesar 6,1% sudah bekerja 11 tahun, sebanyak 2 orang atau sebesar 4,1% sudah bekerja selama 12 tahun, sebanyak 1 orang atau sebesar 2,0% sudah bekerja 34 tahun.

4. Hasil Uji Kualitas Data

a. Hasil Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji validitas tiap-tiap butir pertanyaan pada kuesioner yang telah dirancang. Suatu butir pertanyaan dikatakan valid apabila nilai korelasi (R hitung) dari butir pertanyaan tersebut $> R$ tabel (0,361). Tabel 4.1 disajikan hasil uji validitas untuk setiap butir-butir pertanyaan dari kuesioner.

Tabel 4.7

Uji Validitas terhadap Butir-Butir Pertanyaan Variabel Sistem Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan

P	R Hitung	R Tabel	Keterangan
SPI1	0.889	0.361	Valid (R Hitung > R Tabel)
SPI2	0.974	0.361	Valid (R Hitung > R Tabel)
SPI3	0.867	0.361	Valid (R Hitung > R Tabel)
SPI4	0.981	0.361	Valid (R Hitung > R Tabel)
SPI5	0.906	0.361	Valid (R Hitung > R Tabel)
SPI6	0.859	0.361	Valid (R Hitung > R Tabel)
SPI7	0.941	0.361	Valid (R Hitung > R Tabel)
SAP1	0.904	0.361	Valid (R Hitung > R Tabel)
SAP2	0.936	0.361	Valid (R Hitung > R Tabel)
SAP3	0.931	0.361	Valid (R Hitung > R Tabel)
SAP4	0.897	0.361	Valid (R Hitung > R Tabel)
SAP5	0.862	0.361	Valid (R Hitung > R Tabel)
SAP6	0.905	0.361	Valid (R Hitung > R Tabel)
SAP7	0.943	0.361	Valid (R Hitung > R Tabel)
KLK1	0.899	0.361	Valid (R Hitung > R Tabel)
KLK2	0.861	0.361	Valid (R Hitung > R Tabel)
KLK3	0.923	0.361	Valid (R Hitung > R Tabel)
KLK4	0.871	0.361	Valid (R Hitung > R Tabel)
KLK5	0.889	0.361	Valid (R Hitung > R Tabel)
KLK6	0.958	0.361	Valid (R Hitung > R Tabel)
KLK7	0.967	0.361	Valid (R Hitung > R Tabel)

Sumber : Output SPSS. V. 22.0

Dari tabel 4.7 suatu pertanyaan dikatakan valid apabila nilai R hitung $> 0,361$ (R tabel). Diketahui seluruh nilai R hitung $> 0,361$ (R tabel). Sehingga disimpulkan seluruh pertanyaan kuesioner telah valid.

b. Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas harus dilakukan hanya pada pertanyaan yang telah memiliki atau memenuhi uji validitas, jadi jika tidak memenuhi syarat uji validitas maka tidak perlu diteruskan untuk uji reliabilitas. Berikut hasil dari uji reliabilitas terhadap butir-butir pertanyaan yang valid.

Tabel 4.8
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sistem Pengendalian Internal (X1)	0.977	Reliabel
Standar Akuntansi Pemerintah (X2)	0.976	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0.975	Reliabel

Sumber : Output SPSS. V. 22.0

Tabel 4.8 jika nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,6, maka kuesioner penelitian bersifat reliabel. Diketahui bahwa kuesioner bersifat reliabel, karena seluruh nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,6.

c. Uji Asumsi Klasik

1) Hasil uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji *t* dan *F* mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas terhadap residual dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Tingkat signifikansi yang digunakan $\alpha = 0,05$. Dasar

pengambilan keputusan adalah melihat angka probabilitas p , dengan ketentuan sebagai berikut.

Jika nilai probabilitas $p \geq 0,05$, maka asumsi normalitas terpenuhi.

Jika probabilitas $< 0,05$, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi.

Tabel 4.9
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		49
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.35561685
Most Extreme Differences	Absolute	.059
	Positive	.054
	Negative	-.059
Kolmogorov-Smirnov Z		.415
Asymp. Sig. (2-tailed)		.995

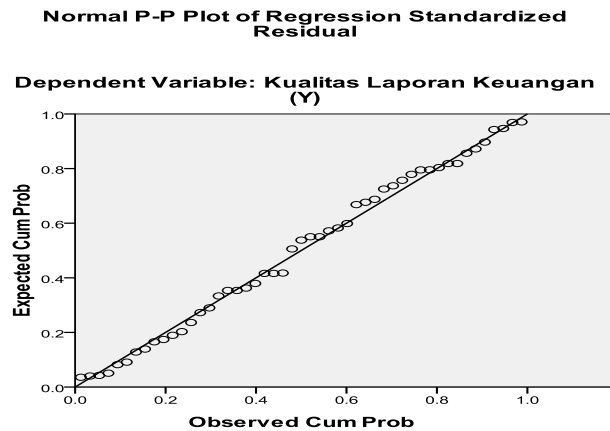
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Output SPSS. V. 22.0

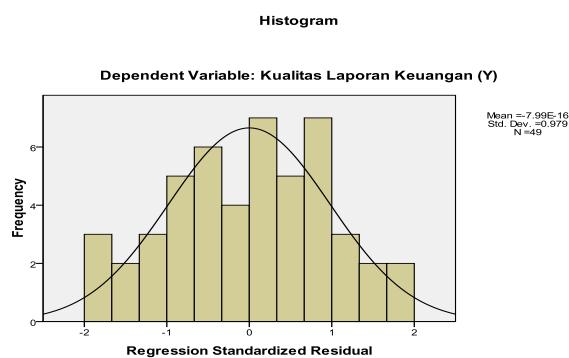
Perhatikan bahwa berdasarkan Tabel 4.9, diketahui nilai probabilitas p atau *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,995. Karena nilai probabilitas p , yakni

0,995, lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi, yakni 0,05. Hal ini berarti data berdistribusi normal.



Gambar 4.1

Uji Normalitas *Normal Probability Plot*



Gambar 4.2

Uji Normalitas Histogram

Gambar 4.1 merupakan pengujian normalitas dengan pendekatan *normal probability plot*, sementara pada Gambar 4.2 merupakan pengujian

normalitas dengan pendekatan histogram. Diketahui pada Gambar 4.1, titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, sementara pada Gambar 4.2, terlihat kurva berbentuk kurva normal, sehingga data berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Untuk memeriksa apakah terjadi multikolinearitas atau tidak dapat dilihat dari nilai *variance inflation factor* (VIF). Nilai VIF yang lebih dari 10 diindikasikan suatu variabel bebas terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2013).

Tabel 4.10
Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Sistem Pengendalian Internal (X1)	.824	1.214
Standar Akuntansi Pemerintah (X2)	.824	1.214

Sumber : Output SPSS. V. 22.0

Perhatikan bahwa berdasarkan Tabel 4.10, nilai VIF dari sistem pengendalian internal adalah 1,214 dan nilai VIF dari standar akuntansi pemerintah adalah 1,214. Dikarenakan seluruh nilai $VIF < 10$, maka disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

a) Uji Heteroskedastisitas

Uji statistik Glejser dipilih karena lebih dapat menjamin keakuratan hasil dibandingkan dengan uji grafik plot yang dapat menimbulkan bias. Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan variabel bebas terhadap nilai *absolute* residual-nya terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Kriteria yang digunakan untuk menyatakan apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak di antara data pengamatan dapat dijelaskan dengan menggunakan koefisien signifikansi. Koefisien signifikansi harus dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang ditetapkan sebelumnya (5%). Apabila koefisien signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas (homoskedastisitas). Jika koefisien signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, maka dapat disimpulkan terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.11
Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.531	.233		2.285	.027
Standar Akuntansi Pemerintah (X2)	-.054	.064	-.149	-.836	.408
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	-.009	.065	-.025	-.141	.889

a. Dependent Variable: abs_residual

Sumber : Output SPSS. V. 22.0

Berdasarkan Tabel 4.11, diketahui nilai Sig. Glejser dari variabel sistem pengendalian internal adalah $0,408 > 0,05$ dan nilai Sig. Glejser dari variabel standar akuntansi pemerintah adalah $0,889 > 0,05$. Diketahui seluruh nilai Sig. Glejser dari masing-masing variabel bebas di atas 0,05, maka disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Pada bagian analisis deskriptif, disajikan distribusi frekuensi dan persentase dari variabel sistem pengendalian internal, standar akuntansi pemerintah dan kualitas laporan keuangan.

Tabel 4.12
Distribusi Frekuensi dan Persentase berdasarkan
Variabel Sistem Pengendalian Internal

P	STS		TS		KS		S		SS		Total		Total	Rata-Rata
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
SPI1	0	0	4	8.16	5	10.2	33	67.35	7	14.29	49	100	3.88	3.88
SPI2	0	0	3	6.12	3	6.12	36	73.47	7	14.29	49	100	3.96	3.96
SPI3	0	0	8	16.33	6	12.24	28	57.14	7	14.29	49	100	3.69	3.69
SPI4	0	0	4	8.16	2	4.08	34	69.39	9	18.37	49	100	3.98	3.98
SPI5	0	0	5	10.2	10	20.41	25	51.02	9	18.37	49	100	3.78	3.78
SPI6	0	0	1	2.04	5	10.2	20	40.82	23	46.94	49	100	4.33	4.33
SPI7	0	0	3	6.12	1	2.04	34	69.39	11	22.45	49	100	4.08	4.08

Sumber : Output SPSS. V. 22.0

- a. Berdasarkan Tabel 4.12, Untuk pertanyaan ke-1 (SPI1), terdapat 4 (8.16%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 5 (10.20%),

responden menjawab S sebanyak 33 (67.35%) dan responden menjawab SS sebanyak 7 (14.29%)

- b. Untuk pertanyaan ke-2 (SPI2), terdapat 3 (6.12%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 3 (6.12%), responden menjawab S sebanyak 36 (73.47%) dan responden menjawab SS sebanyak 7 (14.29%)
- c. Untuk pertanyaan ke-3 (SPI3), terdapat 8 (16.33%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 6 (12.24%), responden menjawab S sebanyak 28 (57.14%) dan responden menjawab SS sebanyak 7 (14.29%)
- d. Untuk pertanyaan ke-4 (SPI4), terdapat 4 (8.16%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 2 (4.08%), responden menjawab S sebanyak 34 (69.39%) dan responden menjawab SS sebanyak 9 (18.37%)
- e. Untuk pertanyaan ke-5 (SPI5), terdapat 5 (10.20%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 10 (20.41%), responden menjawab S sebanyak 25 (51.02%) dan responden menjawab SS sebanyak 9 (18.37%)
- f. Untuk pertanyaan ke-6 (SPI6), terdapat 1 (2.04%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 5 (10.20%), responden menjawab S sebanyak 20 (40.82%) dan responden menjawab SS sebanyak 23 (46.94%)
- g. Untuk pertanyaan ke-7 (SPI7), terdapat 3 (6.12%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 1 (2.04%), responden menjawab S sebanyak 34 (69.39%) dan responden menjawab SS sebanyak 11 (22.45%)

Tabel 4.13

**Distribusi Frekuensi dan Persentase berdasarkan
Variabel Standar Akuntansi Pemerintah**

P	STS		TS		KS		S		SS		Total		Total	Rata-Rata
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
SAP1	1	2.04	5	10.2	4	8.16	36	73.47	3	6.12	49	100	3.71	3.71
SAP2	0	0	1	2.04	11	22.45	29	59.18	8	16.33	49	100	3.9	3.9

SAP3	0	0	8	16.33	11	22.45	26	53.06	4	8.16	49	100	3.53	3.53
SAP4	0	0	11	22.45	12	24.49	19	38.78	7	14.29	49	100	3.45	3.45
SAP5	0	0	9	18.37	5	10.2	28	57.14	7	14.29	49	100	3.67	3.67
SAP6	0	0	4	8.16	10	20.41	27	55.1	8	16.33	49	100	3.8	3.8
SAP7	0	0	1	2.04	2	4.08	38	77.55	8	16.33	49	100	4.08	4.08

Berdasarkan Tabel 4.13

- a. Untuk pertanyaan ke-8 (SAP1), terdapat 1 (2.04%) responden menjawab STS, responden menjawab TS sebanyak 5 (10.20%), responden menjawab KS sebanyak 4 (8.16%), responden menjawab S sebanyak 36 (73.47%) dan responden menjawab SS sebanyak 3 (6.12%)
- b. Untuk pertanyaan ke-9 (SAP2), terdapat 1 (2.04%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 11 (22.45%), responden menjawab S sebanyak 29 (59.18%) dan responden menjawab SS sebanyak 8 (16.33%)
- c. Untuk pertanyaan ke-10 (SAP3), terdapat 8 (16.33%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 11 (22.45%), responden menjawab S sebanyak 26 (53.06%) dan responden menjawab SS sebanyak 4 (8.16%)
- d. Untuk pertanyaan ke-11 (SAP4), terdapat 11 (22.45%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 12 (24.49%), responden menjawab S sebanyak 19 (38.78%) dan responden menjawab SS sebanyak 7 (14.29%)
- e. Untuk pertanyaan ke-12 (SAP5), terdapat 9 (18.37%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 5 (10.20%), responden menjawab S sebanyak 28 (57.14%) dan responden menjawab SS sebanyak 7 (14.29%)
- f. Untuk pertanyaan ke-13 (SAP6), terdapat 4 (8.16%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 10 (20.41%), responden menjawab S sebanyak 27 (55.10%) dan responden menjawab SS sebanyak 8 (16.33%)
- g. Untuk pertanyaan ke-14 (SAP7), terdapat 1 (2.04%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 2 (4.08%), responden menjawab S sebanyak 38 (77.55%) dan responden menjawab SS sebanyak 8 (16.33%)

Tabel 4.14
Distribusi Frekuensi dan Persentase berdasarkan
Variabel Kualitas Laporan Keuangan

P	STS		TS		KS		S		SS		Total		Total	Rata-Rata
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
KLK1	0	0	4	8.16	4	8.16	20	40.82	21	42.86	49	100	4.18	4.18
KLK2	0	0	3	6.12	7	14.29	20	40.82	19	38.78	49	100	4.12	4.12
KLK3	0	0	6	12.24	6	12.24	18	36.73	19	38.78	49	100	4.02	4.02
KLK4	0	0	6	12.24	4	8.16	27	55.1	12	24.49	49	100	3.92	3.92
KLK5	0	0	5	10.2	9	18.37	17	34.69	18	36.73	49	100	3.98	3.98
KLK6	0	0	5	10.2	4	8.16	28	57.14	12	24.49	49	100	3.96	3.96
KLK7	0	0	3	6.12	2	4.08	41	83.67	3	6.12	49	100	3.9	3.9

Sumber : Output SPSS. V. 22.0

- a. Berdasarkan Tabel 4.14, Untuk pertanyaan ke-15 (KLK1), terdapat 4 (8.16%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 4 (8.16%), responden menjawab S sebanyak 20 (40.82%) dan responden menjawab SS sebanyak 21 (42.86%)
- b. Untuk pertanyaan ke-16 (KLK2), terdapat 3 (6.12%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 7 (14.29%), responden menjawab S sebanyak 20 (40.82%) dan responden menjawab SS sebanyak 19 (38.78%)
- c. Untuk pertanyaan ke-17 (KLK3), terdapat 6 (12.24%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 6 (12.24%), responden menjawab S sebanyak 18 (36.73%) dan responden menjawab SS sebanyak 19 (38.78%)
- d. Untuk pertanyaan ke-18 (KLK4), terdapat 6 (12.24%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 4 (8.16%), responden menjawab S sebanyak 27 (55.10%) dan responden menjawab SS sebanyak 12 (24.49%)

- e. Untuk pertanyaan ke-19 (KLK5), terdapat 5 (10.20%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 9 (18.37%), responden menjawab S sebanyak 17 (34.69%) dan responden menjawab SS sebanyak 18 (36.73%)
- f. Untuk pertanyaan ke-20 (KLK6), terdapat 5 (10.20%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 4 (8.16%), responden menjawab S sebanyak 28 (57.14%) dan responden menjawab SS sebanyak 12 (24.49%)
- g. Untuk pertanyaan ke-21 (KLK7), terdapat 3 (6.12%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 2 (4.08%), responden menjawab S sebanyak 41 (83.67%) dan responden menjawab SS sebanyak 3 (6.12%)

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi linear berganda (*multiple linear regression*). Analisis regresi linear berganda digunakan bila jumlah variabel independennya minimal berjumlah sebanyak 2 variabel independen. Penggunaan analisis regresi linear berganda dimaksudkan untuk menentukan pengaruh variabel bebas yang biasa disebut dengan X terhadap variabel tak bebas yang biasa disebut dengan Y . Tabel 4.9 merupakan hasil analisis regresi linear berganda

Tabel 4.15
Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.721	.436		1.651	.106		
Sistem Pengendalian Internal (X1)	.496	.103	.520	4.813	.000	.824	1.214
Standar Akuntansi Pemerintah (X2)	.356	.106	.361	3.348	.002	.824	1.214

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Sumber : Output SPSS. V. 22.0

Berdasarkan Tabel 4.15, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut.

$$Y = 0,721 + 0,496X1 + 0,356X2 + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diinterpretasi sebagai berikut:

1. Diketahui nilai konstanta adalah 0,721. Nilai tersebut dapat diartikan apabila sistem pengendalian internal, standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap variabel dependen kualitas laporan keuangan, maka nilai variabel dependen kualitas laporan keuangan adalah 0,721.

2. Nilai koefisien regresi dari sistem pengendalian internal adalah 0,496. Nilai tersebut dapat diartikan ketika sistem pengendalian internal naik sebesar 1 satuan, maka kualitas laporan keuangan meningkat sebesar 0,496.
3. Nilai koefisien regresi dari standar akuntansi pemerintah adalah 0,356. Nilai tersebut dapat diartikan ketika standar akuntansi pemerintah naik sebesar 1 satuan, maka kualitas laporan keuangan meningkat sebesar 0,356.

10 Uji Hipotesis

1) Uji Parsial (uji t)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Tabel 4.11 menyajikan nilai koefisien regresi, serta nilai statistik t untuk pengujian pengaruh secara parsial.

Tabel 4.16
Uji Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji *t*)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.721	.436		1.651	.106		
Sistem Pengendalian Internal (X1)	.496	.103	.520	4.813	.000	.824	1.214
Standar Akuntansi Pemerintah (X2)	.356	.106	.361	3.348	.002	.824	1.214

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Sumber : Output SPSS. V. 22.0

Berdasarkan hasil uji *t* pada Tabel 4.16 diperoleh hasil:

1. Diketahui nilai koefisien dari sistem pengendalian internal adalah 0,496, yakni bernilai positif. Hal ini berarti sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Diketahui nilai *Sig* dari variabel sistem pengendalian internal adalah $0,000 < 0,05$ dan *t* hitung $4,813 > t$ tabel 2,01, maka sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Diketahui nilai koefisien dari standar akuntansi pemerintah adalah 0,356, yakni bernilai positif. Hal ini berarti standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Diketahui nilai *Sig* dari variabel standar

akuntansi pemerintah adalah $0,002 < 0,05$ dan $t \text{ hitung } 3,348 > t \text{ tabel } 2,01$, maka standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

2) Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel tak bebas kualitas laporan keuangan.

Tabel 4.17
Uji Pengaruh Simultan dengan Uji F
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7.678	2	3.839	29.093	.000 ^a
	Residual	6.070	46	.132		
	Total	13.748	48			

a. Predictors: (Constant), Standar Akuntansi Pemerintah (X2), Sistem Pengendalian Internal (X1)

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Berdasarkan Tabel 4.17, diketahui nilai F hitung 29,093 dan nilai *Sig.* adalah 0,000. Diketahui nilai F hitung $29,093 > F \text{ tabel } 3,199$ dan nilai *Sig* adalah $0,000 < 0,05$, maka sistem pengendalian internal, standar akuntansi pemerintah secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

3) Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) merupakan suatu nilai (nilai proporsi) yang mengukur seberapa besar kemampuan variabel-variabel bebas yang digunakan dalam persamaan regresi, dalam menerangkan variasi variabel tak bebas.

Tabel 4.18
Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.747 ^a	.558	.539	.363265	2.286

a. Predictors: (Constant), Standar Akuntansi Pemerintah (X2), Sistem Pengendalian Internal (X1)

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Sumber : Output SPSS. V. 22.0

Berdasarkan Tabel 4.18, diketahui nilai koefisien determinasi (*R-Square*) adalah 0,558. Nilai tersebut dapat diartikan variabel sistem pengendalian internal, standar akuntansi pemerintah mampu mempengaruhi kualitas laporan keuangan sebesar 55,8% sisanya sebesar $100\% - 55,8\% = 44,2\%$ dijelaskan oleh variabel atau faktor lainnya.

B. Pembahasan

Dari hasil analisis, diketahui bahwa variabel sistem pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintah secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Lebih rinci hasil analisis dan pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan kabupaten Labuhanbatu Utara

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan kabupaten Labuhanbatu Utara diketahui nilai koefisien dari sistem pengendalian internal adalah 0,496, yakni bernilai positif. Hal ini berarti sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Diketahui dengan nilai *Sig* dari variabel sistem pengendalian internal adalah $0,000 < 0,05$ dan $t \text{ hitung } 4,813 > t \text{ tabel } 2,01$, maka sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisien dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.⁶⁷ Tujuan penegndalian internal yang efektif terhadap kualitas laporan keuangan adalah untuk memenuhi tanggungjawab pelaporan keuangan ini. Secara parsial lingkungan pengendalian, penilain resiko, kegiatan penegendalian dan pemantauan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penagruh positif inilah yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintah sejalan dengan kualitas laporan keuangan kabupaten.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Udiyanti et. Al (2014), Herawati (2014) bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

2) Pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Labuhanbatu Utara

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan kabupaten Labuhanbatu Utara diketahui nilai koefisien dari standar akuntansi pemerintah adalah 0,356, yakni bernilai

⁶⁷ Nur Laila Yuliani dan Rahmawati Dwi Agustini. Faktor-faktor yang mempengaruhi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Bisnis Ekonomi, No 1 Vol 14, April 2016

positif. Hal ini berarti standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Diketahui nilai *Sig* dari variabel standar akuntansi pemerintah adalah $0,002 < 0,05$ dan $t \text{ hitung } 3,348 > t \text{ tabel } 2,01$, maka standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Standar akuntansi pemerintah merupakan panduan bagi pemakainya dalam melaksanakan fungsi terkait. Standar merupakan acuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh organisasi yang berkompetensi serta berwenang dalam bidang terkait. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah pasal 9 menyatakan bahwa dengan diberlakukannya peraturan ini maka peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian, peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi pemerintahan. Ketiadaan standar akuntansi pemerintah menimbulkan berbagai permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan.

Dalam menyikapi hal ini, pemerintah daerah pada umum berusaha menggunakan suatu ketentuan atau acuan tertentu dalam menyusun laporan keuangans seperti neraca awal. Sebagai hasilnya, neraca pemerintah daerah beraneka ragam yang penayjian belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam standar akuntansi pemerintah.⁶⁸

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sari, Adiputra dan Sujana (2014), Lestari, Sulindawati, dan Admaja (2014) yang menyatakan bahwa

⁶⁸ Arliya Sari Artana, Skripsi Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemrintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tahun 2016

standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

3) Pengaruh sistem pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan kabupaten labuhanbatu utara

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaruh sistem pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan kabupaten labuhanbatu utara diketahui nilai F hitung 29,093 dan nilai $Sig.$ adalah 0,000. Diketahui nilai F hitung $29,093 > F$ tabel 3,199 dan nilai Sig adalah $0,000 < 0,05$, maka sistem pengendalian internal, standar akuntansi pemerintah secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Artinya, satu sama lain variabel sistem penegendalian internal dan standar akuntansi pemerintah bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan kabupaten.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini yang memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan kabupaten labuhanbatu utara.
2. Standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan kabupaten labuhanbatu utara.
3. Berdasarkan hasil uji simultan, sistem pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintah secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan kabupaten labuhanbatu utara.

B. SARAN

1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel atau mengganti variabel dengan variabel lain yang lebih berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan kabupaten. Misalnya pelatihan, pengalaman kerja dan kompetensi sumber daya manusia.
2. Penelitian lebih lanjut disarankan tidak hanya menggunakan metode survey berupa penyebaran kuesioner, tetapi juga menggunakan metode wawancara untuk memperoleh hasil yang lebih baik, serta menambah jumlah sampel penelitian agar hasil penelitian lebih berpengaruh

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjamaahnya.

Ariens Alfin et al, *Auditing and Assurance Service: An Intergrated Approach*, (Jakarta, Edisi 12, 2008, h. 121

Herman, *pengaruh Ukuran Perusahaan*, h.30

Jurnal Darmaning, Anggun, Putri, SAP dan SPI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Wonogiri

Ikhsan. Arfan, Lili Safrida. dkk,” Analisis Laporan Keuangan”, Penerbit Mandenatera, (Medan: 2018), h.5.

Ikhsan, Arfan, dan Muhammad Yamin Noch, Azizul Kholis Hamdani, Junita Putri Rajana, *AKuntansi Sektor Publik*. (Medan: Madenatera, 2018), h. 248

Ikhsan, Arfan, dan Imam Ghozali, *Metodologi Penelitian Untuk Akuntansi dan Manajeme*, Pt. Madju Medan Cipta), h.10

Ikhsan, Arfan, dan Muhyarsyah, Hasrudi Tanjung, Ayu Oktaviani, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. (Bandung, Citapustaka Media, 2014) h. 105

Mardiasamo. *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: C.V Andi Offset 2009), h. 5

Mulyadi, “*Sistem Akuntansi*”, Penerbit Salemba Empat, (Jakarta:2016), h. 129

Mulyadi, Auditing, Edisi 6, (Jakarta : Salemba Empat, 2002), h. 183

Mulyadi, *Sistem Akuntansi Keuangan*, Edisi (Jakarta : Salemba Empat, 2002), h. 182

Naser. Aqwa Daulay, Muhammad Lathif Ilhamy Nasution, Nur Ahmadi Bi Rahmadi,
“*Manajemen Keuangan*”, Penerbit FEBI UIN-SU Press (FEBI: 2016), h.12

Nordiawan, Dedi Dkk. *Akuntansi Pemerintahan* (Jakarta: Salemba Empat, 2007, h. 1)

Nugraheni, Purwaniati, dan Iman Subaweh. *Pengaruh Penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan*. Jurnal Ekonomi Bisnis No.1 Vol 13. April 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*

Sako Umar, Felmi D. Lantowa, “ *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo*”, Jurnal Of Accounting Science, Vol. 2 No. 1, 2018

Sari, Arliya Artana, Skripsi Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tahun 2016

Syahman, Muhammad Sitompul, Nurlaila Harahap, Hendra Hermain, “*Akuntansi Masjid*”, Penerbit FEBI UIN-SU Press, (FEBI: 2015), h. 65-66

Syafina Laylan, *panduan penelitian Kuantitatif Akuntansi*, (Medan: Febi Press, 2018) h.

Simon dan Schuster (Asia) Pte. Ltd. Printice-Hall.”*Akuntansi di Indonesia*”, Penerbit Salemba Empat, (Jakarta:1997), h. 3

Timotius, Kris H. *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2017) h.16

Jurnal Udiyanti, Ari. Dkk, “*Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Buleleng)*”, *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol 2 No 1, 2014.

Widjaya, Amin Tunggal, *Struktur Pengendalian Intern* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), h. 1.

<http://www.jurnal.id/id/blog/2018-karakteristik-kualitatif-yang-harus-ada-pada-laporan-keuangan/>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kualitas>

<http://tanjungpinang.bpk.go.id/?p=4934>

<https://id.m.wikipedia.org>

<http://wawasanedukasi.blogspot.com/2015/05/regresi-linier-ganda.html?m=1>

Lampiran 1: Kuesioner

PENGANTAR KUESIONER PENELITIAN

Kepada

Yth Bapak/Ibu Pegawai BPKAD, INSPEKTORAT, SETDA Kabupaten Labuhanbatu Utara

Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyusunan skripsi Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, bersama ini peneliti bermaksud menyusun penelitian yang berjudul **“PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA (Studi kasus di Kabupaten Labuhanbatu Utara).”** Oleh karena itu, peneliti membutuhkan data penelitian sesuai dengan judul tersebut. adapun identitas dari peneliti:

Nama : Raviah Azhari Siagian

Nim : 0502163208

Fakultas/prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syariah

Penelitian menyadari sepenuhnya, adanya kuesioner ini menggagu aktivitas Bapak/ Ibu yang padat. Namun dengan segala kerendahan hati, peneliti mohon kiranya Bapak/ Ibu berkenan dengan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini. Partisipasi Bapak/ Ibu dalam memberikan jawaban pada saat setiap pertanyaan kuesioner sebagaimana sesuai dengan kenyataan Bapak/ Ibu sangat kami hargai.

Kuesioner ini hanya untuk keperluan skripsi, tidak untuk di publikasikan secara luas, sehingga kerahasiaan data yang diisi dapat dijaga.

Demikian pengantar kuesioner penelitian ini, atas perhatian dan kerjasama Bapak/ Ibu, peneliti ucapkan terima kasih.

A. Identitas Responden

Untuk keperluan validitas jawaban kuesioner dan analisis data, kami memerlukan jawaban Bapak/Ibu/Saudara/I sebagai responden. Dimohon Bapak/Ibu berkenan mengisi identitas berikut atau memberi tanda *chek list* (✓) pada kotak yang tersedia.

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : ☐ Laki-Laki
☐ Perempuan
3. Usia :
4. Pendidikan terakhir : ☐ SMP/SMA ☐ Diploma
☐ S1 ☐ S2 ☐ S3
5. Latar Belakang Pendidikan
 - a. Akuntansi ☐
 - b. Manajemen ☐
 - c. Ilmu Ekonomi ☐
 - d. Hukum ☐
 - e. Teknik ☐
 - f. Dan lain-lain ☐
6. Jabatan :
7. Masa Kerja :
8. Bagian di Instansi :

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Cara pengisian Kuesioner

- a. Semua pernyataan dijawab dengan cara memberikan tanda (✓) pada salah satu jawaban yang tersedia dan paling tepat menurut persepsi Bapak/Ibu/saudara(i).
- b. Tidak ada benar atau salah dalam memberikan jawaban karena kami hanya memperhatikan pada satu angka atau jawaban yang menunjukkan persepsi terbaik dari Bapak/Ibu/Saudara(i)

2. Terdapat beberapa pilihan pernyataan dan skor dari pernyataan yaitu:

STS : Sangat Tidak Setuju (1)

TS : Tidak Setuju (2)

N : Netral (3)

S : Setuju (4)

SS : Sangat Setuju (5)

VARIABEL (Y) KUALITAS LAPORAN KEUANGAN						
No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
Dapat Dipahami						
1.	Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangan jelas dan disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.					
Relevan						

2.	Laporan keuangan yang saya susun sesuai dengan SAP, dengan informasi yang lengkap mencakup semua informasi akuntansi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.					
3.	Laporan keuangan yang saya susun selesai secara tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan saat ini dan mengoreksi keputusan masa lalu (<i>feedback value</i>).					
Dapat dibandingkan						
4.	Informasi termuat dalam laporan keuangan yang saya susun selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.					
5.	Dalam penyusunan laporan keuangan, saya telah menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada SAP dari tahun ke tahun.					
Andal						
6.	Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangan telah benar dan memenuhi kebutuhan para pengguna dan tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu sehingga teruji k					

	ebenarannya.					
7.	Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangan menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya sehingga bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material.					

VARIABEL (X1) SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL						
No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
Lingkungan Pengendalian		STS	TS	N	S	SS
1.	Pimpinan pegawai selalu melakukan pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, fisik kas, barang, dan secara terus menerus melakukan penilaian terhadap kualitas pengendalian internal.					
Penilaian Risiko						
2.	Pimpinan selalu memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi.					
Prosedur pengendalian						
3.	Kebijakan maupun prosedur pengamanan fisik atas aset telah ditetapkan dengan baik dan					

	pengeluaran uang pada pimpinan pegawai selalu didokumentasikan pada bukti pengeluaran kas					
4.	Intansi pemerintah telah mengembangkan rencana untuk indentifikasi maupun pengamanan atas aset infrastuktur dan semua transaksi yang diproses kedalam computer adalah transaksi yang diotorisasi					
Informasi dan Komunikasi						
5.	Informasi telah disediakan secara tepat waktu dan saluran komunikasi telah dilaksanakan secara efektif					
6.	Penggunaan anggaran/pemegang kas pada masing-masing pimpinan pegawai telah menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat pada waktunya					
Pemantauan						
7.	Pimpinan selalu meriviu dan megevaluasi temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan perlu perbaikan.					

VARIABEL (X2) STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH						
No.	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
Laporan Realisasi Anggaran						
1.	Saya selalu menyusun dan menyajikan laporan realisasi anggaran menggunakan					

	akuntansi berbasis akrual, dan mencatat pendapatan berdasarkan asas bruto.					
Laporan Arus Kas						
2.	Saya selalu menyusun dan menyajikan laporan Arus Kas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, dan menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi.					
Catatan atas Laporan Keuangan						
3.	saya selalu menyajikan informasi secara lengkap tentang penjelasan pos-pos dalam laporan keuangan pada setiap periode pelaporan.					
4.	Saya selalu menyajikan informasi dengan lengkap tentang penjelasan pos-pos dalam laporan keuangan setiap periode pelaporan.					
Neraca						
5.	Saya selalu mengoreksi kesalahan melalui pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan berdasarkan SAP					
Laporan operasional						
6.	Pada instansi tempat saya berkerja, telah dibuat laporan operasional yang mencakup pendapatan –LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa					
Laporan perubahan saldo anggaran lebih						

7.	Pada intansi tempat saya berkerja, telah menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.					
----	--	--	--	--	--	--

Sumber: Ni Made Sudiarianti, dkk (2015).

Lampiran 2 : Tabulasi Data Kuesioner

No	Sistem Pengendalian Internal (X1)						
	SPI1	SPI2	SPI3	SPI4	SPI5	SPI6	SPI7
1	5	5	5	5	5	5	5
2	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4
6	4	4	4	4	4	4	4
7	4	4	4	4	4	4	4
8	4	4	4	4	4	4	4
9	4	4	4	4	4	4	4
10	4	4	4	4	4	4	4
11	5	5	5	5	5	5	5
12	5	4	4	4	4	4	5
13	4	4	4	4	4	3	4
14	4	4	4	4	4	4	4
15	3	4	4	4	4	3	5
16	4	4	4	4	4	4	4
17	4	4	4	4	4	4	4
18	4	4	4	4	4	4	4
19	2	4	4	4	4	4	4
20	2	3	2	2	2	3	2
21	4	2	2	4	2	4	4
22	2	4	4	4	4	4	4
23	4	4	2	3	3	5	4
24	2	3	3	2	3	3	2
25	4	4	4	4	3	5	4
26	5	4	4	4	4	4	5
27	5	4	2	4	4	4	5
28	5	4	2	4	4	4	5
29	4	4	4	4	3	5	4
30	3	2	3	2	3	2	2
31	4	4	2	4	2	5	4
32	4	4	4	4	3	5	4
33	4	4	4	4	3	5	4

34	4	4	4	4	4	5	4
35	4	4	3	4	2	5	4
36	4	4	2	4	4	5	4
37	4	4	4	4	4	5	4
38	4	4	4	2	4	5	5
39	4	5	5	5	5	5	5
40	4	4	4	4	5	5	5
41	4	4	5	5	2	5	4
42	3	2	2	4	5	5	4
43	4	4	3	5	5	5	4
44	4	5	4	5	3	5	4
45	5	5	5	5	5	5	5
46	4	5	5	5	5	5	4
47	4	5	5	4	5	5	4
48	3	4	3	5	3	5	4
49	3	3	3	3	3	3	3

Standar Akuntansi Pemerintah (X2)

SAP1	SAP2	SAP3	SAP4	SAP5	SAP6	SAP7
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	2	2	4	2	4
4	3	4	3	4	4	4
4	4	4	4	3	4	4
5	5	5	5	5	5	5
4	3	3	3	4	4	4
4	4	2	2	2	2	4
4	3	3	3	4	3	4
4	3	4	4	4	4	4
1	4	3	3	5	5	4
4	4	4	4	3	4	4
5	5	4	4	3	4	5
4	3	3	3	4	4	4
4	3	4	4	4	3	4
3	3	3	3	2	4	4
4	4	4	4	4	3	4

4	4	3	2	2	3	4
2	4	4	3	4	4	4
2	3	3	2	3	3	2
2	2	4	2	4	4	4
4	4	4	2	4	2	4
5	5	5	5	5	5	5
2	3	3	2	2	3	3
4	4	4	3	5	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	2	2	4	4
4	4	4	4	4	3	4
4	4	4	4	4	4	4
3	3	2	3	3	2	3
2	4	2	4	4	4	4
4	4	4	4	4	3	4
4	4	2	2	4	4	4
4	4	2	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	2	2	2	4	4
4	4	4	4	2	4	4
4	5	5	4	4	5	4
4	4	4	5	4	4	5
4	4	5	3	5	5	4
4	5	4	2	4	5	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	5	5	4	5
4	5	4	5	4	5	4
4	3	2	3	2	3	5
4	5	4	5	4	5	4
3	4	3	5	2	4	5
3	5	4	3	4	3	4
4	4	3	4	5	4	5

Kualitas Laporan Keuangan (Y)						
KLK1	KLK2	KLK3	KLK4	KLK5	KLK6	KLK7
5	4	5	5	5	5	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	2	4	2	4
5	5	4	5	5	5	4
4	4	4	5	4	4	4
5	5	4	5	5	5	4
4	4	5	4	5	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	3	4	4
4	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	5	4	4
5	3	5	4	5	5	5
4	4	4	2	4	4	4
5	4	5	4	4	4	4
4	4	4	4	3	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
3	3	2	2	2	3	2
4	4	3	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	4	5	4	4
2	2	3	3	2	2	2
5	5	5	4	4	5	5
4	4	4	4	3	4	4
4	4	3	3	4	3	4
4	4	4	4	4	4	4
5	3	5	4	5	4	4
3	3	2	2	3	2	3
5	5	5	4	3	4	4
5	3	5	2	2	4	4
2	5	3	4	3	4	4
5	5	2	4	4	5	4
5	5	5	5	4	2	4

5	5	3	4	5	5	4
5	5	5	5	5	2	2
5	5	5	2	5	4	4
5	2	3	5	5	4	4
5	5	2	4	5	5	4
3	5	2	5	3	4	4
5	3	5	3	2	4	4
5	2	5	4	5	5	4
5	5	5	5	2	4	4
5	5	5	4	5	4	4
3	5	2	4	5	5	4
2	5	5	5	3	3	3
4	5	4	5	3	5	4
2	3	5	3	5	3	4

Lampiran 3 : Hasil olah data

Uji Validitas dan Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.977	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
SPI1	21.7667	41.633	.889	.975
SPI2	21.7333	42.478	.974	.970
SPI3	21.8667	42.878	.867	.976
SPI4	21.8333	41.454	.981	.969
SPI5	21.9000	43.128	.906	.974
SPI6	21.6333	42.309	.859	.977
SPI7	21.6667	40.782	.941	.971

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.976	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
SAP1	21.3000	41.666	.904	.972
SAP2	21.2333	42.461	.936	.970
SAP3	21.4000	41.972	.931	.970
SAP4	21.5667	41.495	.897	.973
SAP5	21.4000	41.834	.862	.975
SAP6	21.3333	42.713	.905	.972
SAP7	21.1667	42.144	.943	.969

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.975	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KLK1	21.8000	44.303	.899	.972
KLK2	21.9333	45.926	.861	.975
KLK3	21.8333	43.868	.923	.970
KLK4	22.1333	45.637	.871	.974
KLK5	22.0667	44.685	.889	.973
KLK6	21.9333	44.616	.958	.968
KLK7	21.9000	44.576	.967	.968

Lampiran Statistik Deskriptif

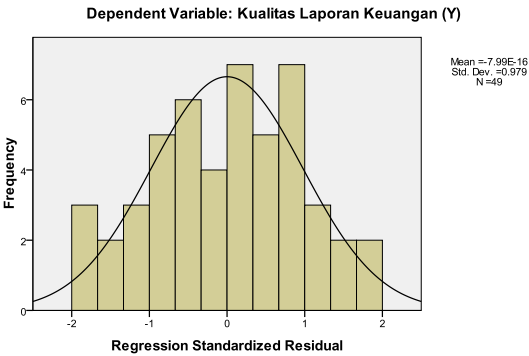
P	STS		TS		KS		S		SS		Total		Total	Rata-Rata
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
SPI1	0	0	4	8.16	5	10.2	33	67.35	7	14.29	49	100	3.88	3.88
SPI2	0	0	3	6.12	3	6.12	36	73.47	7	14.29	49	100	3.96	3.96
SPI3	0	0	8	16.33	6	12.24	28	57.14	7	14.29	49	100	3.69	3.69
SPI4	0	0	4	8.16	2	4.08	34	69.39	9	18.37	49	100	3.98	3.98
SPI5	0	0	5	10.2	10	20.41	25	51.02	9	18.37	49	100	3.78	3.78
SPI6	0	0	1	2.04	5	10.2	20	40.82	23	46.94	49	100	4.33	4.33
SPI7	0	0	3	6.12	1	2.04	34	69.39	11	22.45	49	100	4.08	4.08

P	STS		TS		KS		S		SS		Total		Total	Rata-Rata
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
SAP1	1	2.04	5	10.2	4	8.16	36	73.47	3	6.12	49	100	3.71	3.71
SAP2	0	0	1	2.04	11	22.45	29	59.18	8	16.33	49	100	3.9	3.9
SAP3	0	0	8	16.33	11	22.45	26	53.06	4	8.16	49	100	3.53	3.53
SAP4	0	0	11	22.45	12	24.49	19	38.78	7	14.29	49	100	3.45	3.45
SAP5	0	0	9	18.37	5	10.2	28	57.14	7	14.29	49	100	3.67	3.67
SAP6	0	0	4	8.16	10	20.41	27	55.1	8	16.33	49	100	3.8	3.8
SAP7	0	0	1	2.04	2	4.08	38	77.55	8	16.33	49	100	4.08	4.08

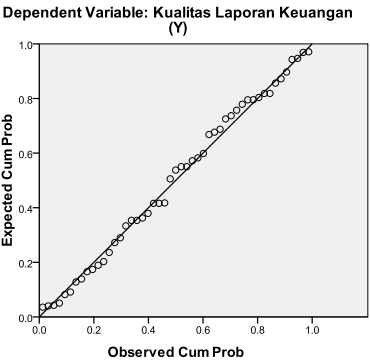
P	STS		TS		KS		S		SS		Total		Total	Rata-Rata
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
KLK1	0	0	4	8.16	4	8.16	20	40.82	21	42.86	49	100	4.18	4.18
KLK2	0	0	3	6.12	7	14.29	20	40.82	19	38.78	49	100	4.12	4.12
KLK3	0	0	6	12.24	6	12.24	18	36.73	19	38.78	49	100	4.02	4.02
KLK4	0	0	6	12.24	4	8.16	27	55.1	12	24.49	49	100	3.92	3.92
KLK5	0	0	5	10.2	9	18.37	17	34.69	18	36.73	49	100	3.98	3.98
KLK6	0	0	5	10.2	4	8.16	28	57.14	12	24.49	49	100	3.96	3.96
KLK7	0	0	3	6.12	2	4.08	41	83.67	3	6.12	49	100	3.9	3.9

Lampiran Uji Normalitas

Histogram



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		49
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.35561685
Most Extreme Differences	Absolute	.059
	Positive	.054
	Negative	-.059
Kolmogorov-Smirnov Z		.415
Asymp. Sig. (2-tailed)		.995

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Lampiran Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Sistem Pengendalian Internal (X1)	.824	1.214
	Standar Akuntansi Pemerintah (X2)	.824	1.214

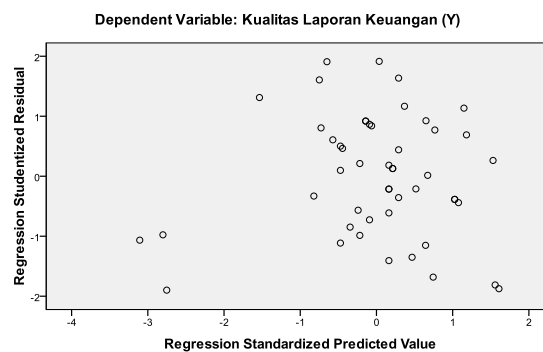
Lampiran Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.531	.233		2.285	.027
	Standar Akuntansi Pemerintah (X2)	-.054	.064	-.149	-.836	.408
	Kualitas Laporan Keuangan (Y)	-.009	.065	-.025	-.141	.889

a. Dependent Variable: abs_residual

Scatterplot



Lampiran Regresi Linear Berganda

Variables Entered/Removed

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Standar Akuntansi Pemerintah (X2), Sistem Pengendalian Internal (X1) ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.747 ^a	.558	.539	.363265	2.286

a. Predictors: (Constant), Standar Akuntansi Pemerintah (X2), Sistem Pengendalian Internal (X1)

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7.678	2	3.839	29.093	.000 ^a
	Residual	6.070	46	.132		
	Total	13.748	48			

a. Predictors: (Constant), Standar Akuntansi Pemerintah (X2), Sistem Pengendalian Internal (X1)

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.721	.436		1.651	.106		
	Sistem Pengendalian Internal (X1)	.496	.103	.520	4.813	.000	.824	1.214
	Standar Akuntansi Pemerintah (X2)	.356	.106	.361	3.348	.002	.824	1.214

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Lampiran T Tabel dan F Tabel

fx =TINV(D4;C4)		
C	D	E
Df	Tingkat Signifikansi	t Tabel
46	0.05	2.012896

fx =FINV(E4;C4;D4)			
C	D	E	F
df1	df2	Tingkat Signifikansi	F Tabel
2	46	0.05	3.199582

NO	NAMA	TENANT TERDAFTAR/DAFTAR	No rekening	jumlah per periode (Rp)	lama gwt	keuntungan bersih	Saldo akhir periode (Rp)
40	MAKAMAH HANADIP	PT. MAKAMAH HANADIP (PERSEROAN TERBATAS)	21.17.05.001001.8	1.332.000	180.000	-	490.000
41	WETILIA	PT. BAKTI TERDAFTAR (PTSD)	21.12.05.000215.4	1.332.000	180.000	588.445	891.000
42	JOEY KEMILIA	PT. BAKTI TERDAFTAR (PTSD)	21.12.05.000215.4	1.332.000	180.000	-	1.080.000
43	PTSD KEMILIA HANADIP	PT. BAKTI TERDAFTAR (PTSD)	21.12.05.000215.4	1.332.000	180.000	-	1.080.000
44	MAKAMAH HANADIP	PT. BAKTI TERDAFTAR (PTSD)	21.12.05.000215.4	1.332.000	180.000	-	1.080.000
45	MAKAMAH HANADIP	PT. BAKTI TERDAFTAR (PTSD)	21.12.05.000215.4	1.332.000	180.000	-	1.080.000
46	JOEY KEMILIA HANADIP	PT. BAKTI TERDAFTAR (PTSD)	21.12.05.000215.4	1.332.000	180.000	-	1.080.000
47	JOEY KEMILIA HANADIP	PT. BAKTI TERDAFTAR (PTSD)	21.12.05.000215.4	1.332.000	180.000	-	1.080.000
48	PTSD KEMILIA HANADIP	PT. BAKTI TERDAFTAR (PTSD)	21.12.05.000215.4	1.332.000	180.000	-	1.080.000
49	PTSD KEMILIA HANADIP	PT. BAKTI TERDAFTAR (PTSD)	21.12.05.000215.4	1.332.000	180.000	-	1.080.000
50	PTSD KEMILIA HANADIP	PT. BAKTI TERDAFTAR (PTSD)	21.12.05.000215.4	1.332.000	180.000	-	1.080.000

[illegible]



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend Sudirman No 27 Telp 0624 – 92070

Aek Kanopan

**DAFTAR HADIR TKS SETDAKAB TAHUN 2020
BAGIAN UMUM SETDAKAB**

NO.	BAGIAN UMUM	NO HP
1.	SRI MEUTIANI	
2.	DWI MENA PUTRI PITRIA ✓	
3.	EKA FUSPTA DEWI	
4.	TINA SARI	
5.	MUHAMMAD ADHAR	
6.	SARI RAMADONA ✓	
7.	FACHRUL ROZI ✓	
8.	SAFAR ARJIAN ✓	
9.	MUHAMMAD YANIS	
10.	SAMUEL ADRIANTO SIMANUNTAK	
11.	LIDI ARJIANI TAMBUNAN	
12.	ADWAR ANAS MUNTIR ✓	
13.	DEWAN	
14.	MANAN BATUBARA	
15.	ISKANDAR RATTUBARA	



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. JENDRAL SUPRIAN NO 27 TELP 0624- 92070
AEK KANOPAN 21457

Nomor
Lampiran
Perihal

: 031 / 1140/ Organisasi/ 2020
: -
: Pemberian Izin Riset

Aek Kanopan, 27 Juli 2020
Kepada Yth Sdr :
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara
di-
Tempat

Menindaklanjuti surat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor : B-
2344/EB.IKS.02/07/2020 Perihal Permohonan Izin Riset Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini Sekretariat Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Utara memberikan izin kepada Mahasiswa/i Universitas
Islam Negeri Sumatera Utara, atas nama :

Nama : Raviyah Azhari Siagian
NIM : 0502163208

Program Studi : Akutansi Syariah


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Standar

Akutansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan \

Keuangan Kabupaten Labuhanbatu Utara

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

a.n. SEKRETARIS DAERAH LABUHANBATU UTARA
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
Kepala Bagian Organisasi
Ub.

MUTIASMAH NUR LUBIS, AP, MSI
Pembina T.C.I (IV/b)
Nip. 19751207 199412 1 001

Tembusan:
1. Sekretaris Daerah Labuhanbatu Utara;
2. Peninggal.



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JLN. KOPTU MAHMUN LUBIS NO. 7-8 KOMPLEKS PASAR LAMA TELP. FAX. (0624) 693208
AEK KANOPAN

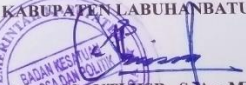
REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 072/023 /Kesbang/2020

1. Dasar : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
b. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Rincian Tugas Jabatan Struktural Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Menimbang : Surat Ketua Sekolah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor B-2885/FEB.I/KS.02/07/2020 tanggal 23 Juli 2020 Perihal Permohonan Izin Penelitian (Riset)
- a. Nama : **RAVIAH AZHARI SIAGIAN**
b. Alamat : Jalan Jendral Sudirman No. 245
c. Pekerjaan : Mahasiswi
d. NPM : 0502163208
e. KTP : 1223017011990002
f. Lokasi : Inspektorat, BPKAD, Bidang Umum Protokol dan Setdakab serta Bidang Keuangan Setdakab.
g. Waktu : 23 Juli 2020 s/d 29 Juli 2020
h. Program Studi / Jurusan : S-1 Akutansi Syariah
i. Judul Penelitian : Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Standar Akutansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
j. Penanggungjawab : Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag
3. Pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan Penelitian dimaksud dengan catatan, yang bersangkutan diwajibkan mematuhi Ketentuan/Peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum di daerah setempat dan Peneliti diwajibkan melaporkan hasilnya ke Badan Kesbangpol Kabupaten Labuhanbatu Utara.
4. Apabila ketentuan dimaksud pada butir 3 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka rekomendasi ini tidak berlaku.
5. Demikian Rekomendasi Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengurusan Ijin Penelitian.

Aek Kanopan, 23 Juli 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA


ENDANG SAKTI HSB, S.Ag. MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600101198602 1 007

Tembusan:

1. BPKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Utara.
3. Bidang Keuangan Setdakab.
4. Bidang Umum dan Protokol Setdakab.



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jln. Koptu Mahmud Lubis Komp. Pasar No.2-3. Telp. 0624-693393
AEK KANOPAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 071/ 688/Sekr/2020

Yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama : Drs. ABD. HARIS RANGKUTY, MAP
b. Jabatan : Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

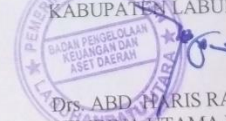
dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : RAVIAH AZHARI SIAGIAN
b. NPM : 0502163208
c. Program Studi : S-1 Akuntansi Syariah
d. Fakultas : Ekonomi Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Adalah benar telah melakukan Penelitian (Riset) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai dengan Surat Rekomendasi Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 072/023/Kesbang/2020 tanggal 23 Juli 2020 dengan Judul Penelitian "PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA".

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aek Kanopan, 20 Juli 2020
Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,



Drs. ABD. HARIS RANGKUTY, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.196206251990081001



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
INSPEKTORAT KABUPATEN

Jl. Kopu Mahmud Lubis Komplek Pasar Blok C No. 1-2
Telp. (0624) 693501 Aek Kanopan 21457 Email: insplabura@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: 071/617/INSP.1.A/VII/2020

Yang bertandatangan dibawah ini :

a. Nama : Nur Rahman, S.Sos

b. Jabatan : Plt. Inspektur Kabupaten Labuhanbatu Utara

Dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama : RAVIAH AZHARI SIAGIAN

b. NPM : 0502163208

c. Program Studi : S-1 Akuntansi Syariah

d. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Adalah benar telah melakukan Penelitian (Riset) pada Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor : B-2343/EB.I/KS.02/07/2020 tanggal 16 Juli 2020 dan surat Rekomendasi Penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 072/023/Kesbang/2020 tanggal 23 Juli 2020 dengan judul penelitian "PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN STANDAR AKUNTASI PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA".

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya

Aek kanopan, 30 JULI 2020

PLT. INSPEKTOR KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA

NUR RAHMAN, S.Sos

PEMBINA TK. I (IV/b)

NIP. 19720617 199203 1 002

DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2020
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NO	NAMA	NIP	PANGKAT		JABATAN		MASA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN			USIA TANGGAL	CAT MUTASI KEGAWAJAN	KET
			GOL RUANG	TMT	NAMA	TMT	THN	BLN	NAMA	BLN & THN	JAM	NAMA	LULUS TAHUN	TINGKAT BAZAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Drs. ABD. HARISSAGUTY, MAP	196306251990081001	IV/c	1/10/2019	Pt. Kepala Badan	2/3/2020	25	0				Administrasi Publik	2008	S-2	25/6/1962		
2	Drs.H. FAZAL IRWAN DALUMINTE, M.Si	197302121998021001	IV/c	1/10/2019	Analisis Layanan Umum	12/2/2020	23	11	Diklat Pim II	Agustus s/d Desember 2018	-	Ilmu Administrasi Pemerintah Daerah	2012	S-2	12/2/1973		
3	MUHAMMAD HUSIN, SE	197607252006041008	IV/a	1/4/2018	Sekretaris	21/12/2016	23	5	-	-	-	Ilmu Ekonomi Manajemen Perusahaan	2005	S-1	25/7/1976		
4	HENDRAWAN NASUTION, SE, M.Si	198006122007011019	III/d	1/10/2017	Kabid Anggaran	21/12/2016	15	2	-	-	-	Ilmu Administrasi Pemerintah Daerah	2016	S-2	12/6/1980		
5	ADI DARSING, SE	198106192007011001	III/c	1/10/2016	Kabid Aset	21/12/2016	11	4	-	-	-	Ilmu Ekonomi Manajemen	2007	S-1	19/6/1981		
6	PENNY INDRALINA, S.Kom	198409032010012021	III/c	1/10/2016	Kabid Akuntansi	21/12/2016	9	11	-	-	-	Ilmu Komputer Sistem Informasi	2007	S-1	3/9/1984		
7	HERU SUHENDRO, S.Sos	198005232010011014	III/c	1/4/2018	Kabid Perbendaharaan	12/7/2019	9	11	-	-	-	Ilmu Administrasi Negara	2004	S-1	23/5/1980		
8	RUMANA, SE	196812302989032003	III/d	1/10/2014	Kasubbag Umum	21/12/2016	25	9	-	-	-	Ilmu Ekonomi Manajemen	2007	S-1	30/12/1968		
9	HAMDAN RITONGA, SE	198407142010011013	III/d	1/4/2019	Kasubbid Administrasi Anggaran	21/12/2016	9	11	-	-	-	Ilmu Ekonomi Pembangunan	2008	S-1	14/7/1984		
10	SUROSO, SE	198210322010011021	III/c	1/10/2015	Kasubbid Inventarisasi dan Akuisisi	21/12/2016	9	11	-	-	-	Ilmu Ekonomi Akuntansi	2006	S-1	3/11/1982		
11	Muhibban, SH	198212252007012008	III/c	1/4/2018	Kasubbag Program	12/7/2019	12	9	-	-	-	Hukum Perdata	2011	S-1	25/12/1982		
12	SRI WAHYUNI, SE	198111142010012018	III/c	1/4/2018	Kasubbid Kebijakan Akuntansi dan Neraca Daerah	21/12/2016	9	11	-	-	-	Ilmu Ekonomi Akuntansi	2005	S-1	14/11/1981		

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Raviah Azhari Siagian
NIM : 0502163208
Tempat/Tgl Lahir : Aek Kanopan, 30 November 1998
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Aek kanopan, Jl. Jendral Sudirman

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tamatan SD Muhammadiyah 01 Aek Kanopan Berijazah tahun 2010
Tamatan SMP Muhammadiyah 24 Aek Kanopan Berijazah tahun 2013
Tamatan SMA Muhammadiyah 09 Aek Kanopan Berijazah tahun 2016
Tamatan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Berijazah tahun 2020

III. RIWAYAT ORGANISASI

Anggota PMP Labura (2018)
Anggota MOU Labura (2016)